

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

2023



2024

**KABUPATEN
MOROWALI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat hidayahnya dan Inayahnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Morowali Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu laporan kinerja instansi pemerintah.

LKjIP Kabupaten Morowali Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023. Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali dalam mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Morowali Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Morowali, Maret 2023

Pj Bupati Morowali,



A. RACHMANSYAH ISMAIL

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 atas perencanaan kinerja memiliki lima (5) misi dengan lima (5) Tujuan strategis dengan lima (5) Indikator Kinerja Utama serta dua puluh enam (26) Sasaran strategis dengan tiga puluh enam (36) indikator kinerja utama.

Indikator Kinerja utama dari Tujuan Strategis tersebut atas realisasi / capaian yang di peroleh di tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel Capaian Tujuan Strategis

	IKU	Target	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)	Ket
T.S 1	Indeks Refromasi Birokrasi Kab. Morowali	B(60-70)	CC(55,56)	79,29	Baik (Belum Mencapai Target)
T.S 2	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	5-6	n/a		Belum rilis
T.S 3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,00-76,00	73,82	98,43	Baik (Belum Mencapai Target)
T.S 4	Indeks Infrastruktur Kabupaten	1,51-3,75 (Tinggi)	n/a		Belum rilis
T.S 5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55-60	80,01	133,35	Baik Sekali (Melebihi Target)

1. Pada Tujuan Stategis I (TS.I) terdapat lima (5) indikator sasaran strategis dengan capaian :
 - a. S.S 1 Indikator Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP): capaian 74,63% dengan kategori capaian Cukup (C)
 - b. S.S 2 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat masih menunggu data rilis
 - c. S.S 3 Indikator Opini hasil pemeriksaan BPK masih menunggu data rilis
 - d. S.S 4 dengan capaian 114,02% dengan kategori capaian Baik Sekali (BS) karena dapat melebihi target
 - e. S.S 5 dengan capaian 189,23% dengan kategori capaian Baik Sekali (BS) karena dapat melebihi target

2. Tujuan Stategis II (TS.II) terdapat sepuluh (10) indikator sasaran strategis dengan capaian :

- a. S.S 1 Indikator Pertumubahan ekonomi masih menunggu data rilis
- b. S.S 2 indikator Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan capaian -0,21 dengan kategori capaian Kurang (K)
- c. S.S 3 indikator PDRB Perkapita masih menunggu data rilis
- d. S.S 4 Indikator Gini Rasio dengan capaian 106,33 dengan kategori Capaian Baik Sekali (BS) dan melebihi target
- e. S.S 5 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan capaian 142% dengan kategori capaian Baik Sekali (BS) dan melebihi target
- f. S.S 6 Memiliki indikator :
 - Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) capaian 101,25%, kategori capaian Baik Sekali (BS) dan melebihi target dan
 - indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan capaian 94,34, kategori capaian Baik (B) namun belum mencapai target
- g. S.S 7 Indikator Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) capaian indikator 99,19%, kategori capaian Baik (B), belum mencapai target
- h. S.S 8 Indikator Persentase Penduduk Miskin capaian indikator 100,7%, kategori capaian Baik Sekali (B) dan mencapai target
- i. S.S 9 Indikatro Persentase PMKS Kebutuhan Dasarnya capaian 111,63%, kategori capaian Baik sekali (BS) dan melebihi target

3. Tujuan Strategis III (T.S III) terdapat dua belas (12) indikator sasaran strategis dengan capaian :

- a. S.S 1 Memiliki 3 indikator :
 - Indeks Pendidikan dengan capaian belum rilis
 - Harapan Lama Sekolah dengan capaian 92,28%, kategori capaian Baik (B) namun belum melebihi target
 - Rata-rata lama sekolah dengan capaian 90,97%, kategori capaian Baik (B), belum mencapai terget.
- b. S.S 2 Memiliki dua (2) indikator :
 - Indeks Kesehatan dengan capaian 0,62%, kategori capaian Kurang (K)

- Usia Harapan Hidup dengan capaian 121,86%, kategori capaian Baik Sekali (BS) dan melebihi target
 - Angka Stunting dengan capaian 101,52%, kategori capaian Baik Sekali (BS) dan melebihi target
- c. S.S 3 Memiliki dua (2) indikator :
- Tingkat partisipasi pemuda : capaian 25%, kategori capaian Kurang (K), belum mencapai target
 - Peningkatan Partisipasi Olahraga, capaian 13,51%, kategori capaian Kurang (K) dan belum mencapai target
- d. S.S 4 dengan indikator Indeks Pembanguna Gender (IPG) belum rilis
- e. S.S 5 dengan capaian indikator belum rilis
- f. S.S 6 dengan capaian indikator belum rilis
4. Tujuan Stategis IV (TS.IV) terdapat enam (6) indikator sasaran strategis dengan capaian :
- a. S.S 1 memiliki 3 Indikator :
- Indikator Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, capaian 134,93%, kategori capaian Baik Sekali (BS) dan melebihi target
 - Indikator Rasio Elektrifikasi, capaian indikator 99,92%, kategori capaian Baik (B) dan belum mencapai target
 - Persentase layak huni dengan capaian 102,35%, kategori capaian Baik Sekali (BS) dan melebihi target
- b. S.S 2 memiliki 3 Indikator :
- Persentase RT berakses air bersih capaian 100,97%, kategori capaian Baik Sekali (BS) dan melebihi target
 - Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi : capaian 97%, kategori capaian Baik (B) dan belum mencapai target
 - Perentase koneksi internet Desa : capaian 48,08, kategori capaian Kurang (K) dan belum mncapai target

5. Tujuan Stategis V (TS.V) terdapat enam (6) indikator sasaran strategis dengan capaian :

a. S.S 1 memiliki 2 Indikator :

- Indeks rawan Bencana belum rilis
- Persentase Desa Tangguh Bancana : capaian 40,02%, kategori capaian Kurang (K) dan belum mencapai target

b. S.S 2 dengan indikator Cakupan pelayanan persampahan kota, capaian 49,41% kategori capaian Kurang (K) dan belum mencapai target

c. S.S 3 indikator Cakupan layanan kebakaran skala kabupaten belum rilis

d. S.S 4 indikator Cakupan Angka kriminalitas belum rilis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR	II
DAFTAR ISI	VI
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Wilayah Daerah Kabupaten Morowali	2
1.3 Jumlah Penduduk	3
1.4 Perangkat Daerah	5
1.5 Sumber Daya Aparatur	8
1.6 Isu Strategis.....	10
BAB II	21
PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis 2018-2023	21
2.2 Perjanjian Kinerja	25
BAB III	30
AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Pengukuran dan Capaian Kinerja	30
3.2 Realisasi Anggaran.....	85
BAB IV PENUTUP	90
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. dimana pelaporan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala kinerja Pemerintah, baik kinerja yang melebihi target, sesuai dengan target maupun kegagalan memenuhi target yang telah ditentukan.

1.2 Gambaran Umum Wilayah Daerah Kabupaten Morowali

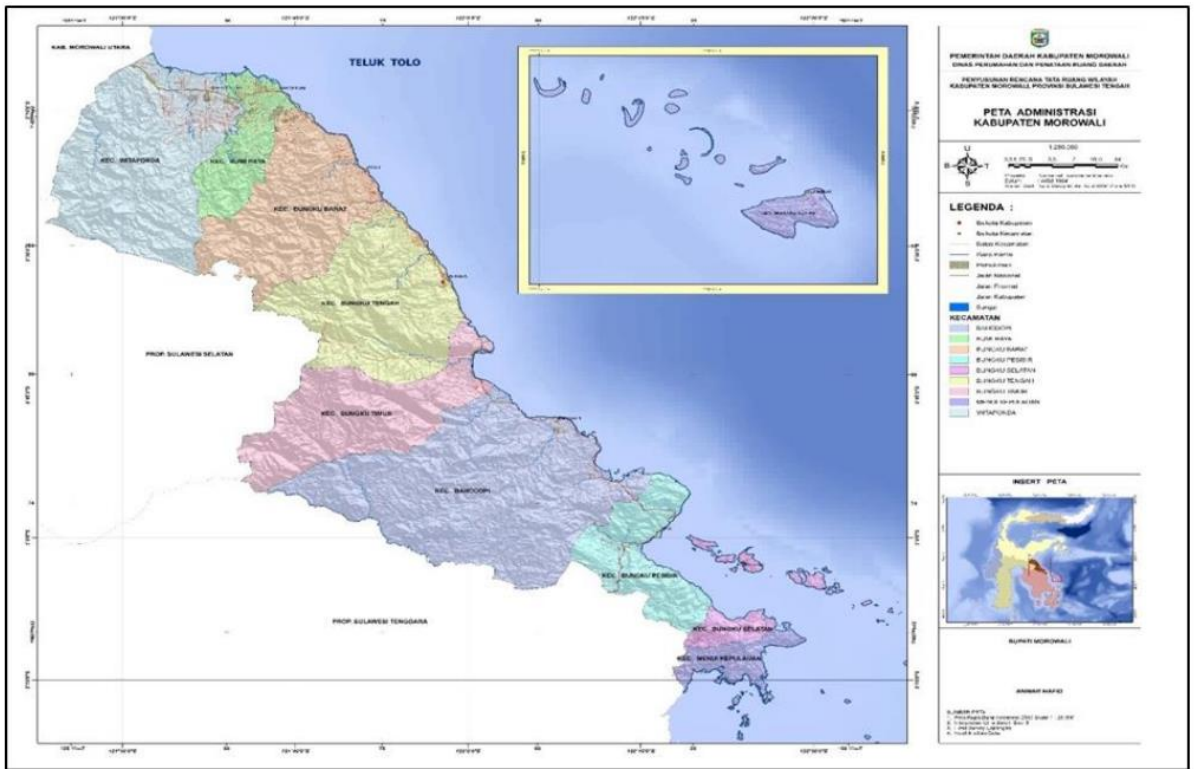
Kabupaten Morowali merupakan Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1999. Kabupaten Morowali merupakan aspirasi yang sudah tumbuh di masyarakat setempat.

Posisi geografis Kabupaten Morowali memiliki batas-batas yakni

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan,
- sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dan
- Sebelah Timur merupakan wilayah perairan Teluk Tolo.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Morowali dalam angka tahun 2024, akhir tahun 2023, wilayah administrasi kabupaten Morowali terdiri dari 9 wilayah kecamatan, luas wilayah daerah Kabupaten Morowali yaitu 5.472 Km², yang terdiri atas daratan masing-masing kecamatan yaitu Menui Kepulauan (223,63 km²), Bungku Selatan (403,90 km²), Bahodopi (1 080,98 Km²), Bungku Pesisir (867,29 Km²), Bungku Tengah (725,57 Km²), Bungku Timur (387,23 Km²), Bungku Barat (758,93 Km²), Bumi Raya (504,77 Km²), Witaponda (519,70 Km²). Daerah Kabupaten Morowali memiliki jumlah pulau sebanyak 44 pulau yang terdapat di Kecamatan Menui Kepulauan dengan memiliki jumlah pulau 15, Bungku Selatan memiliki jumlah pulau 22 dan Bahodopi terdapat 7 pulau.

Secara astronomis, Kabupaten Morowali terletak antara 010 31"12" Lintang Selatan dan 030 46" 48" Lintang Selatan serta antara 1210 02" 24" Bujur Timur dan 1230 15" 36" Bujur Timur. Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen) berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya (11,45 persen) merupakan pulaupulau kecil terutama bagian paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulaupulau kecil. Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan wilayah kepulauan.



Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Morowali

1.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Morowali pada tahun 2022 mencapai 179.225. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah penduduk menurut kecamatan

No.	WILAYAH	KEPALA KELUARGA			PENDUDUK			WAJIB KTP		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	Bungku Tengah	9722	2046	11768	17468	15562	33030	12177	10665	22842
2	Bungku Selatan	3952	1112	5064	7742	7327	15069	5327	4962	10289
3	Menui Kepulauan	3669	1138	4807	7059	6989	14048	4940	4976	9916
4	Bungku Barat	5597	1091	6688	9609	7692	17301	7019	5326	12345
5	Bumi Raya	4827	941	5768	8675	7915	16590	6168	5540	11708
6	Bahodopi	15761	1949	17710	23355	16378	39733	17276	10826	28102
7	Wita Ponda	6312	1303	7615	11389	10450	21839	8027	7361	15388
8	Bungku Pesisir	2211	437	2648	4048	3594	7642	2818	2466	5284
9	Bungku Timur	3965	787	4752	7321	6652	13973	5044	4478	9522
KAB MOROWALI		56016	10804	66820	96666	82559	179225	68796	56600	125396

(sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester 1, tahun 2023)

1.4 Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi, kebututahn daerah serta melaksanakan tugs pembantuan dari pemerintah. Perangkat Daerah Kabupaten Morowali yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai tidank lanjut tersebut diatas ditetapkan Peraturan Bupati Mororwali tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah maupun Peraturan Bupati Morowali mengenai pembentukan uit pelaksana teknis daerah.

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali, yakni sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Tipe A;
2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretraiat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Pendidikan merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemukiman dan pertanahan;
8. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial ;
9. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub Pemadam Kebakaran;
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan ;
13. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Dinas Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
15. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan ;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, usaha mikroa kecil dan menengah;

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
19. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan Dinas Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan Perpustakaan dan Kearsipan;
21. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan Badan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
25. Badan Pengelolaan Pendapatan merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan Sub Pendapatan;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe C melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian ;
27. Badan Penanggulangan Bencana melaksanakan urusan di bidang bencana;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan bangsa dan politik;
29. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;
30. Rumah Sakit Umum Paku;
31. Kecamatan terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Bungku Tengah Tipe A;
 - 2) Kecamatan Bungku Barat Tipe A;
 - 3) Kecamatan Bungku Timur Tipe A;
 - 4) Kecamatan Bungku Pesisir Tipe A;

- 5) Kecamatan Bahodopi Tipe A;
- 6) Kecamatan Bungku Selatan Tipe A;
- 7) Kecamatan Menui Kepulauan Tipe A;
- 8) Kecamatan Bumi Raya Tipe A;
- 9) Kecamatan Witaponda Tipe A dan
- 10) Kecamatan Sombori Kepulauan Tipe A

1.5 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Morowali berjumlah 3.425

a) Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	Pemerintah Kab. Morowali	1372	1787	3159

b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	I/a	0	0	0
2	I/b	0	1	1
3	I/c	0	0	0
4	I/d	6	0	6
5	II/a	12	5	17
6	II/b	52	50	102
7	II/c	107	100	207
8	II/d	158	128	286
9	III/a	137	285	422
10	III/b	182	327	509
11	III/c	133	223	356
12	III/d	244	376	620
13	IV/a	168	161	329
14	IV/b	154	124	278
15	IV/c	18	6	24
16	IV/d	1	1	2
17	IV/e	0	0	0
TOTAL		1372	1787	3159

c) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	STRUKTURAL	218	143	361
2	FUNGSIONAL	629	1189	1818
3	PELAKSANA	525	455	980
TOTAL		1372	1787	3159

d) Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	SD	0	1	1
2	SMP	8	2	10
3	SMA/SMK	403	247	650
4	D.I	2	7	9
5	D.II	38	65	103
6	D.III	57	253	310
7	S1/D.IV	749	1116	1865
8	S2	115	93	208
9	S3	0	3	3
TOTAL		1372	1787	3159

e) Data Jabatan Struktural

NO	ESELON	JENIS KELAMIN		
		FORMASI	TERISI	LOWONG
1	I.b		0	
2	II.a		1	
3	II.b		46	
4	III.a		22	
5	III.b		95	
6	IV.a		100	
7	IV.b		97	
TOTAL			361	

f) Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan pendidikan

NO	PDDKN	ESS. I	ESS. II	ESS. III	ESS. IV	JUMLAH
1	SMA/SMK	0	0	0	1	1
2	D.I	0	0	0	0	0
3	D.II	0	0	0	0	0
4	D.III	0	0	0	49	49
5	S1/D.IV	0	27	78	127	232
6	S2	0	19	39	19	77
7	S3	0	1	0	1	2
TOTAL		0	47	117	197	361

g) Data Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin

NO	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH	SDH PIM	BLM PIM
		PRIA	WANITA			
1	I.b	0	0	0	0	0
2	II.a	1	0	1	10	3
3	II.b	30	16	46	5	2
4	III.a	16	6	22	32	1
5	III.b	57	38	95	77	17
6	IV.a	58	42	100	7	21
7	IV.b	56	41	97	18	45
TOTAL		218	143	361	149	89

1.6 Isu Strategis

Penelaahan isu strategis Global yang mempengaruhi Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali, dituangkan dalam Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi eksternal yang sebagai dinamika internasional, nasional dan regional. Adapun Isu-Isu strategis global yaitu :

1) Penanggulangan Penyebaran dan Upaya Pemulihan Kesehatan Pasca Pandemi Covid-19

Wabah virus corona atau COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona sendiri bertambah signifikan. Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Pandemi terakhir yang terjadi di dunia adalah pada 2009 akibat flu babi yang menewaskan ratusan ribu orang. Ciri-ciri pandemi meliputi: merupakan jenis virus baru, dapat menginfeksi banyak orang dengan mudah, serta bisa menyebar antar manusia secara efisien. Virus corona atau Covid-19 memiliki ketiga karakteristik tersebut.

2) Krisis Perekonomian Global

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Betapa mengglobalnya dunia saat ini khususnya mengenai pergerakan orang, barang dan jasa semakin tanpa mengenal batas wilayah, pertimbangan ekonomi adalah alasannya.

Perekonomian global sampai akhir tahun 2020 ditandai ketidakpastian dan menuju pada krisis ekonomi global berbagai kejutan telah menghantam dunia. Salah satunya adalah penyebaran virus corona baru (SARS-CoV-2) penyebab pandemi COVID-19 yang membuat banyak negara pontang-panting. Penyebaran virus baru itu membuat sejumlah negara mengambil langkah penguncian wilayah (*lockdown*) dan kebijakan physical distancing atau jaga jarak fisik kepada warganya. Sayangnya, kebijakan lockdown di sejumlah negara ini tak pelak memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian karena beberapa sektor tidak bisa beroperasi secara normal. Akibatnya tampak pada

banyak hal, seperti mulai adanya pengurangan karyawan dan kenaikan harga beberapa komoditas. International Monetary Fund (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook* edisi April 2020 memangkas angka pertumbuhan ekonomi global.

3) *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Pencapaian tujuan pembangunan milenium yang berkelanjutan merupakan isu penting dalam peningkatan martabat kemanusiaan secara bersama sama. Isu ini meliputi beberapa tujuan pembangunan manusia yang secara langsung dapat memberikan dampak bagi perbaikan lingkungan hidup. Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan dideklarasikan pada akhir tahun 2015, berorientasi pada peningkatan martabat dan kualitas hidup manusia melalui : (1) Perubahan konsep dan fokus isu yang mendasar secara signifikan terhadap isu-isu permasalahan lingkungan.; (2) Perkembangan pembangunan menjadi siklus yaitu *Economic Development - Population Development - Environment Development*.

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki 6 aspek yang perlu dicapai dalam dunia global antara lain: *thriving lives and livelihoods* (kehidupan yang sehat dan layak), *sustainable food security* (keamanan dan ketahanan pangan), *secure sustainable water* (sumber air bersih), *universal clean energy* (energi yang aman), *healthy and productive ecosystems* (ekosistem yang produktif dan sehat), *governance for sustainable Societies* (kebijakan yang berpihak terhadap komunitas). Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2021 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Kabupaten Morowali pada khususnya.

Kemuliaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagian diperlambangkan dalam 17 Tujuan atau *Goals* yang terukur untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, pembangunan berkelanjutan menuntut manusia untuk memperhatikan keterkaitan (*interlinkages*) antar ke 17 Tujuan, dan saling ketergantungan antar 167 Target yang diukur melalui 241

indikator dan dengan memperhatikan bahwa alam dan seisinya adalah pembatas kelangsungan kehidupan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Perpres tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya. Pelaksanaan SDG's berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Untuk keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDG's tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini juga menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda SDG's.

SDGs sudah mengakomodasi secara holistik berbagai pilar pembangunan, tidak hanya pilar ekonomi dan sosial, namun juga pilar lingkungan serta hukum dan tata kelola. Dengan adanya pandemi covid 19 yang mulai dirasakan masyarakat global pada akhir tahun 2019 dan berlanjut sampai akhir 2020, maka tentunya tidak dapat dihindari lagi akan mempengaruhi berbagai skema pembangunan global dan nasional. Sumber daya yang ada sekarang ini akan lebih banyak diprioritaskan pada penanganan pandemi covid 19, dan juga mendukung ekonomi masyarakat yang banyak terdampak. Pandemi Covid 19 tentunya juga akan mempengaruhi target pencapaian SDGs secara keseluruhan, FAO (2020) menyatakan bahwa pandemi Covid 19 akan mempengaruhi pencapaian 14 tujuan pembangunan.

4) Degradasi Lingkungan Hidup

Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di

dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu yang di penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

Perlindungan lapisan ozon dan perubahan iklim (Protocol Kyoto), keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), polusi dari kapal, dan perlindungan kehidupan laut.

Fakta yang ditunjukkan Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) terjadi anomali kenaikan suhu akibat adanya efek rumah kaca pada akhir abad ke-21, ada tren kenaikan 2-4,5 derajat celsius. Bila hal ini dibiarkan saja tanpa ada perubahan perilaku manusia, berbagai bencana besar akan terjadi karena anomali perubahan iklim akan memicu kekacauan pada keberlanjutan industri pangan, pertanian, dan kenaikan air permukaan laut karena mencairnya es di kutub. Oleh karena itu perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Berbagai kerusakan lingkungan yang dirasakan saat ini ternyata memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masa kini, lalu kemudian muncul keinginan untuk memperbaiki. Hal ini terjadi silih berganti sesuai dengan zamannya yang merupakan siklus hidup dari masa ke masa, dari zaman ke zaman dan dari peradaban ke peradaban. Kondisi memasuki peralihan dari fase buruknya

daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menjadi fase positif terhadap lingkungan. Sekarang ini umumnya manusia telah menyadari pentingnya alam untuk kelangsungan hidup. Perlahan manusia memperbaiki alam yang telah rusak dan mengurangi hal-hal yang merugikan alam. Manusia melakukan upaya penyelamatan hutan dan makhluk hidup lain yang menggantungkan kehidupannya pada alam. Namun, banyak pula manusia yang terus mencemari alam tanpa memikirkan risiko yang ditimbulkan ke depan. Meski memang tidak dapat dipungkiri bahwa mengembalikan keseimbangan alam merupakan pekerjaan yang sulit dan terkadang butuh biaya tidak sedikit, namun jika ada tekad dan komitmen, maka insya Allah pasti dapat dilakukan untuk tujuan dan keinginan terciptanya lingkungan hidup yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan.

Untuk membatasi peningkatan suhu global dilakukan berbagai upaya untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan. Upaya mempertahankan lingkungan hidup agar kondisi lingkungan hidup yang baik dapat dinikmati oleh generasi saat ini hingga generasi mendatang. Oleh karena itu, isu lingkungan hidup menjadi isu utama dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

5) Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara

ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami

Saat ini dunia berada pada Industri 4.0 dimana industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan *teknologi cyber*. Istilah "*smart factory*" akan menjadi hal yang lumrah kita dengar di era Industri 4.0 sebagaimana saat ini kita mendengar istilah *smartphone*, *smartcard* dan istilah-istilah lain yang ditambahkan prefiks *smart*. Istilah "Industrie 4.0" dicetuskan oleh pemerintah Jerman pada tahun 2011 yang lalu. Sebagian orang membandingkan Industri 4.0 dengan Revolusi Industri Generasi Keempat (Fourth Industrial Revolution). Revolusi Industri Generasi Keempat sendiri merupakan transformasi sistemik yang lebih luas cakupannya daripada Industri 4.0, yang mana didalamnya mencakup dampak terhadap masyarakat, struktur pemerintahan dan peranan manusia itu sendiri dalam struktur ekonomi dan manufaktur. Jadi, bisa disimpulkan Industri 4.0 adalah subset dari Revolusi Industri Generasi Keempat.

Dirangkum dari *World Economic Forum (WE)*, nanti pada tahun 2020 dimana era Revolusi Industri Generasi Keempat dimulai ada sepuluh *soft skill* yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan dunia industri. *Soft skill* tersebut adalah menyelesaikan permasalahan yang kompleks/sulit (*Complex Problem Solving*), berpikir kritis (*Critical Thinking*), kreatifitas (*Creativity*), manajemen SDM (*People Management*), koordinasi (*Coordinating*), kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence*), pengambilan keputusan (*Judgment and Decision Making*), orientasi pada layanan (*Service Orientation*), negosiasi (*Negotiation*) dan kelenturan berpikir (*Cognitive Flexibility*). Tujuan utama dari industri 4.0 ini adalah kestabilan distribusi barang dan kebutuhan. Industri 4.0 memungkinkan pendataan kebutuhan masyarakat secara *real time*,

dan mengirim data tersebut ke produsen. Sehingga, para produsen dapat memproduksi dengan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan. Tentunya secara ekonomi, hal ini dapat menjaga kestabilan harga. Secara bisnis, hal ini dapat memperluas pasar. Pelacakan produk dan transparansi akan semakin mengarah ke layanan baru. Hal ini dimungkinkan karena mekanisme Industri 4.0 mengintegrasikan produsen dengan jalur pasokan tanpa batas geografis.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara *online*.

6) Ketahanan Pangan

Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga perlu upaya-upaya yang berkekanjutan untuk memperbaiki struktur produksi pangan yang diikuti dengan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, bahkan dapat bejolak secara sosial dan politik apabila ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini

bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.

Menurut FAO *Agricultural and Development Economics Division* (June 2006) tentang “*Food Security*”, ketahanan pangan dimaknai sebagai ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya.

Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan juga merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan dapat dilihat dari kacamata keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (*self-sufficiency*) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko yang dihadapi oleh suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini masih banyak orang lapar. Salah satu ancaman serius dan ditakuti oleh umat manusia di muka bumi ini adalah terjadinya kelangkaan akan kecukupan pangan. Kelangkaan pangan ini telah menimbulkan persoalan-persoalan sosial dan politik yang serius. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika menjadi pengalaman yang berharga. Tingginya harga pangan menjadi salah satu sebab munculnya gerakan reformasi yang radikal. Mozambique adalah salah satu negara contoh yang mengalami persoalan pangan dan berakhir pada ketidakstabilan politik.

Adanya dampak sosial yang cukup memprihatinkan dari meroketnya harga pangan dunia menciptakan kerusuhan-kerusuhan horizontal dan sekaligus mengancam stabilitas keamanan negara itu. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin mahal mendorong permintaan akan peningkatan pendapatan demi bertahan dalam situasi ekonomi dan politik yang sulit. Berdasarkan laporan *Food Security Information Network* (FSIN), kemungkinan krisis pangan dunia

semakin memburuk, dan tampaknya keadaan ini akan bertambah parah di sejumlah tempat di dunia, khususnya di beberapa negara yang ketahanan pangannya rendah, sehingga berpotensi menghadapi tingginya risiko kelaparan.

Wilayah dan negara yang disinyalir memiliki potensi kelaparan yang tinggi antara lain di beberapa wilayah di Timur Laut Nigeria, Somalia, Sudan Selatan dan Yemen. Penyebab kelaparan di beberapa negara ini yakni karena adanya konflik bersenjata, kekeringan, buruknya situasi ekonomi makro, dan politik.

Sebagaimana yang diumumkan FSIN, bahwa terdapat 108 juta orang menghadapi tingkat kritis kerawanan pangan pada 2019, dan terus meningkat secara drastis dari angka di tahun sebelumnya yang tercatat sekitar hanya 80 juta orang. Penyebaran daerah rawan pangan akan terjadi di beberapa wilayah Asia lainnya menyusul Irak, Suriah, Malawi dan Zimbabwe.

Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia (FAO), diestimasi sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia yang masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan.

Kabupaten Morowali sebagai salah penghasil tanaman pangan di Pulau Sulawesi juga diharapkan menjadi salah satu pemasok penting kebutuhan pangan terutama beras dan Sayur-mayur di Sulawesi Tengah maupun di sebagian wilayah pulau Sulawesi. Terkait dengan isu pangan tersebut Kabupaten Morowali perlu melakukan banyak melakukan peningkatan kinerja hasil pangan melalui berbagai cara seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dinamika pembangunan yang terjadi saat ini akan berdampak pada alih fungsi lahan produktif pertanian, sehingga perlu upaya-upaya pengendalian yang konsistensi berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mendukung perwujudan pencapaian target ketahanan pangan daerah maupun nasional.

7) Keterbatasan Energi

Isu internasional energi dan sumberdaya mineral adalah keterbatasan energy dan pengembangan energy baru terbarukan, pertambangan illegal dan pertambangan berkelanjutan. Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan, namun saat ini dunia dihadapkan pada produksi minyak yang terus menurun dan sebaliknya kebutuhan akan konsumsi minyak terus meningkat sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional.

Salah satu upaya untuk mengatasi isu dimaksud sejak tahun 2012 ditetapkan sebagai tahun energi terbarukan internasional oleh PBB dalam rangka meraih tiga target besar yaitu: menjamin akses yang setara atas energi modern, melipatgandakan efisiensi energi dan melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi global sebelum 2030. Di level regional (APEC) juga mengagendakan isu energi dan ketahanan pangan disamping isu-isu perekonomian.

Sumberdaya hutan di Kabupaten Morowali masih luas sehingga aktifitas pertanian dan kehutanan akan memberi pilihan antara kebutuhan energi dan pangan sebagai suatu substitusi. Artinya adalah para pelaku ekonomi di bidang pertanian dituntut untuk cerdas memilih komoditi yang akan diproduksi. Jika pilihan pilihan ekonomi saja menjadi pertimbangan maka konflik kepentingan terjadi. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Isu global diatas akan menjadi konflik konflik lokal jika tidak diantisipasi.

- 8) Dunia menghadapi ancaman Bencana Alam Global

Cuaca ekstrem, angin topan, dan tornado adalah beberapa bencana alam yang sering terjadi pada tahun 2019-2020. Semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana-bencana ini sering kali dikaitkan dengan perubahan iklim global. Oleh karena bencana alam adalah sesuatu yang kompleks, dan perubahan iklim dapat memperparah kondisinya. Pemanasan global yang terjadi sebagai salah satu efek perubahan iklim menyebabkan kandungan uap air di atmosfer semakin meningkat. Semakin tingginya kadar uap air akan mempengaruhi tingkat kelembapan di atmosfer. Kondisi atmosfer yang lembap akan memicu terjadinya badai besar yang terjadi. Ancaman badai semakin diperparah oleh berkurangnya perbedaan suhu antara ekuator dengan kutub. Akibat adanya *global warming*, temperatur di kutub mengalami lebih banyak peningkatan jika dibandingkan dengan perubahan temperatur yang terjadi di ekuator. Peningkatan suhu yang sangat drastis di kutub membuat perbedaan suhu antara ekuator dengan kutub menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini sebenarnya membuat potensi kejadian badai dengan intensitas kecil semakin jarang terjadi. Namun, secara bersamaan, hal tersebut ternyata meningkatkan ancaman terbentuknya badai berintensitas tinggi di atmosfer bumi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin. Perencanaan strategis juga merupakan Langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Morowali menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023. P RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

A. Visi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

Visi Kabupaten Morowali tahun 2018-2023 adalah “ **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali yang Sejahtera Bersama**”

B. Misi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

Dalam mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Morowali, yaitu :

- 1) Menciptakan pemerintah yang baik dan bersih melalui peningkatan kapabilitas, profesionalitas dan kesejahteraan

aparatur pemerintah daerah berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan;

- 2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya (SDA), pengembangan UMKM, IKM, Koperasi dan BUMDES untuk mencapai kesejahteraan bersama.;
- 3) Mewujudkan pelayanan pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas melalui pembiayaan gratis, berlandaskan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama;
- 4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan infrastruktur daerah sehingga mengurangi kesenjangan wilayah dan terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia;
- 5) Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim dan bencana;

Penjabaran misi dalam tujuan pembangunan daerah termasuk indikator dan target disajikan dalam tabel 2.1

Tabel. 2.1

Penjabaran Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah beserta indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun

No	Indikator	Satuan	Target Tahun Ke				
			2019 R	2020 R	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Morowali	Kategori	NA	NA	CC	B	B
2	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai	C	CC	B	B	BB
3	Indeks kepuasan masyarakat	Kategori	NA	NA	B	B	B
4	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	Indeks	NA	0,6147	0,6647	0,7147	0,7647
6	Persentase Status Desa Maju	Persen	8	8	9-10	10-11	12-13
7	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	5,37	5-6	5-6	5-6	5-6
8	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	20,2	28,93	10-15	10-15	10-15
9	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	13,09	-4,7	4-6	4-6	4-6
10	PDRB Perkapita	Konstan Rp. (juta)	281,01	356,2	300-400	300-400	300-400
11	Gini Rasio	Indeks	0,304	0,304	0,30-0,24	0,30-0,24	0,30-0,24
12	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	Persen	3,03	5,21	3-5	2-3	2-3
13	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	95	97,5	100-102	100-102	100-102
14	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	103	103	104	105	106
15	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	NA	NA	80.00-82.00	83.00-85.00	86.00-88.00
16	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,75	13,14	13,10-12,22	12,75-11,01	12,40-9,8
17	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	na	na	65-70	70-75	75-80

No	Indikator	Satuan	Target Tahun Ke				
			2019 R	2020 R	2021	2022	2023
18	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,02	72,21	73,00-74,00	74,00-75,00	75,00-76
19	Indeks Pendidikan	Indeks	NA	NA	50,00-55,00	50,00-55,00	50,00-55,00
20	Harapan lama sekolah	Tahun	13,31	13,34	13,34-14,00	14,00-14,30	14,30-14,50
21	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	9,11	9,33	9,33-9,70	9,70-10	10-10,30
22	Indeks Kesehatan	Indeks	NA	NA	69-69,33	69,33-69,50	69,50-70
23	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,77	69,18	69,18-69,33	69,33-69,50	69,50-70
24	Angka Stunting	Persen	12,00	7,60	7,60-7,10	7,10-6,60	6,60-6,10
25	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	55,3	60,22	68,55	75,5	100
26	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Medali Juara	19	31	31	35	37
27	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,71	84,89	85-90	85-90	85-90
28	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	NA	75	75-80	75-80	75-80
29	Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	Persen	NA	75	75-80	75-80	75-80
30	Indeks Kerukunan Beragama	Indeks	NA	55	60-65	65-70	70-80
31	Indeks Infrastruktur Kabupaten	Katagori	1.25	1.25	1.26-	1.26-2.50	1.51-3.75

No	Indikator	Satuan	Target Tahun Ke				
			2019 R	2020 R	2021	2022	2023
		(Nasional)	(Rendah)	(Rendah)	2.50 (Sedang)	(Sedang)	(Tinggi)
32	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	26,22	14,5	14,50-20,00	20,00-25,00	25,550-30,00
33	Rasio elektrifikasi	Persen	96,2	98,7	98,7-99,00	98,7-99,00	99,00-99,20
34	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	NA	NA	80-85	80-85	80-85
35	Persentase RT berakses air bersih	Persen	86,99	89,64	90-92	90-92	90-92
36	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	Persen	75	80	85-90	85-90	90-95
37	Presentase Koneksi Internet Desa	Persen	58,6	70,6	70,6	75-80	80-90
38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		NA	55	55-60	55-60	55-60
39	Indeks Rawan Bencana	Indeks	NA	NA	100-95	95-90	90-85
40	Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen	NA	NA	15,87-17,46	17,46-19,84	19,84-23,80%
41	Cakupan Pelayanan Persampahan Kota	Persen	80,1	82	85	90	100
42	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten	Persen	85	85	95	100	100
43	Angka Kriminalitas	Persen	8	8	8-5	8-5	8-5

2. 2 Perjanjian Kinerja

Mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali dan perubahannya Tahun 2023, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Target Capaian Tujuan Strategis

Misi I : Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui peningkatan Kapabilitas, Profesionalitas dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Nilai-nilai Kebenaran dan Keadilan

TUJUAN STRATEGIS 1			
Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
1.1	Indeks Refromasi Birokrasi Kab. Morowali	Kategori	B
Sasaran Strategis 1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			
1.1.1.1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB
Sasaran Stretegis 1.1.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik			
1.1.2.1	Indeks kepuasan masyarakat	Kategori	B
Sasaran Stretegis 1.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah			
1.1.3.1	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP
Sasaran Stretegis 1.1.4 Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa			
1.1.4.1	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	Indeks	0,7647
1.1.4.2	Persentase Status Desa Maju	%	12-13

**Misi II : Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Pengembangan UMKM, IKM dan Bumdes untuk
mencapai kesejahteraan Bersama.**

TUJUAN STRATEGIS 2			
Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan Bersama			
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
2.1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	5-6
Sasaran Strategis 2.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi			
2.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	10-15
Sasaran Stretegis 2.1.2 Tumbuhnya Investasi Daerah			
2.1.2.1	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	4-6
Sasaran Stretegis 2.1.3 Meningkatkan PDRB perkapita			
2.1.3.1	PDRB Perkapita	Konstan Rp. (juta)	300-400
Sasaran Stretegis 2.1.4 Rendahnya Ketimpangan Pendapatan antar Masyarakat			
2.1.4.1	Gini Rasio	Indeks	0,30-0,24
Sasaran Stretegis 2.1.5 Menurunnya Jumlah Pengangguran			
2.1.5.1	Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT)	%	2-3
Sasaran Stretegis 2.1.6 Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan			
2.1.6.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100-102
2.1.6.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	106
Sasaran Stretegis 2.1.7 Meningkatkan Ketersediaan Pangan			
2.1.7.1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	86,00-88,00
Sasaran Stretegis 2.1.8 Menurunnya Penduduk Miskin			
2.1.8.1	Persentase Penduduk Miskin	%	12,40-9,8
Sasaran Stretegis 2.1.9 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat			
2.1.9.1	Persentase PMKS Kebutuhan Dasarnya	%	75-80

Misi III : Mewujudkan pelayanan pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas melalui pembiayaan gratis, berlandaskan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama

TUJUAN STRATEGIS 3				
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)				
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	
3.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,00-76,00	
	Sasaran Strategis 3.1.1 Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam Meciptakan Generasi Muda yang Imtaq			
	3.1.1.1	Indeks Pendidikan	Indeks	50,00-55,00
	3.1.1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,30-14,50
	3.1.1.3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10-10,30
	Sasaran Stretegis 3.1.2 Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan			
	3.1.2.1	Indeks Kesehatan	Indeks	69,50-70
	3.1.2.2	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50-70
	3.1.2.3	Angka Stunting	Persen	6,60-6,10
	Sasaran Stretegis 3.1.3 Meningkatnya Partisipasi Oraganisasi Kepemudaan dan Prestasi Olahraga Daerah			
	3.1.3.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepemudaan	Persen	100
	3.1.3.2	Peningkatan Partisipasi olahraga	Jumlah Medali Juara	37
	Sasaran Stretegis 3.1.4 Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah			
	3.1.4.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85-90
	Sasaran Stretegis 3.1.5 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal			
	3.1.5.1	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	%	75-80
	3.1.5.2	Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	%	75-80
	Sasaran Stretegis 3.1.6 Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Beragama Kabupaten Morowali			
	3.1.6.1	Indeks Kerukunan Beragama	Indeks	70-80

MISI IV: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah sehingga Mengurangi Kesenjangan Wilayah dan Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Bahagia

TUJUAN STRATEGIS 4				
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar				
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	
4.1	Indeks Infrastruktur Kabupaten	Kategori (Nasional)	1,51-3,75 (Tinggi)	
	Sasaran Strategis 4.1.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar daerah			
	4.1.1.1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	30,00-35,00
	4.1.1.2	Rasio Elektrifikasi	%	99,00-99,20
	4.1.1.3	Persentase Rumah Layak Huni	%	80-85
	4.1.1.4	Persentase RT berakses air bersih	%	90-92
	Sasaran Stretegis 4.1.2 Meningkatnya Pemanfaatn Teknologi Informasi dan Komunikasi			
	4.1.2.1	Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	%	90-95
	4.1.2.2	Perentase koneksi internet Desa	%	80-90

Misi V : Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim Dan Bencana

TUJUAN STRATEGIS 5			
Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Berkurangnya Resiko Bencana			
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55-60
Sasaran Strategis 5.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
5.1.1.1	Indeks rawan Bencana	Indeks	90-95
5.1.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	19,84-23,80
Sasaran Strategis 5.1.2 Meningkatnya Layanan Kebersihan dan Penataan Lingkungan Kota Bungku			
5.1.2.1	Cakupan pelayanan persampahan kota	%	100
Sasaran Strategis 5.1.3 Meningkatnya Respon dan Layanan kebakaran kabupaten			
5.1.3.1	Cakupan layanan kebakaran skala kabupaten	%	100,00
Sasaran Stretegis 5.1.4 Menurunnya Gangguan ketentraman dan Ketertiban			
5.1.4.1	Angka kriminalitas	%	8-5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali.

Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Berdasarkan indikator tujuan dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Morowali. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik(B)
3.	55% s.d 75%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Secara umum Pemerintah Kabupaten Morowali telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Morowali tahun 2018-2023.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis I “ Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih

Misi I Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih melalui Kapabilitas, Profesionalitas dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Nila-nilai Kebenaran Keadilan”. Dengan Tujuan Strategis I adalah Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Tujuan Strategis 1

TUJUAN STRATEGIS (T.S) I								
Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih								
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%)	Keterangan	Sumber Data
				2022	2023	2023		
1.1	Indeks Refromasi Birokrasi Kab. Morowali	Kategori	B(60-70)	CC (52,45)	CC(55,56)	79,50	Belum mencapai target	LHE Reformasi Birokrasi Kementerian PAN RB
Sasaran Strategis (S.S) 1.1.1								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah								
1.1.1.1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Nilai	(75)BB	CC(51,73)	CC(52,99)	74,63	Belum mencapai target	LHE SAKIP
Sasaran Stretegis (S.S) 1.1.2								
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik								
1.1.2.1	Indeks kepuasan masyarakat	Kategori	B	B	n/a	n/a		Belum rilis
Sasaran Stretegis (S.S) 1.1.3								
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah								
1.1.3.1	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP	WTP			Belum rilis	
Sasaran Stretegis (S.S)1.1.4								
Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa								

1.1.4.1	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	Indeks	0,7647	Status Desa Mandiri = 3 Desa	22 Desa Status Desa Mandiri IDM =0,8165 s/d 0,8719	114,02	Melebihi target	Dinas Pemerintahan Desa
				Status Desa Maju = 36 Desa	Status Desa Maju =31 Desa IDM 0,7127 s/d 0,8129			
1.1.4.2	Persentase Status Desa Maju	%	12-13	28,6	24,6	189,23	Melebihi target	

Pada tabel 3.1 diatas nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Morowali tahun 2023 adalah 55,56 dengan kategori CC.

Gambar 3.1
Nilai Indeks RB Pemerintah Kabupaten Morowali

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	50,21
B	RB Tematik	20	5,35
C	Indeks RB	120	55,56
			(CC)

Dari data diatas dapat terlihat nilai Indeks RB adalah 55,65 dengan ketgori CC. Namun nilai hasil evaluasi tahun 2023 tidak dapat di perbandingkan dengan tahun sebelumnya karena komponen penilaian tahun 2023 berbeda, karena Perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Refromasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Nilai Indeks RB Tahun 2023 belum mencapai target dengan kategori B dengan nilai 65.

Analisis Faktor kegagalan : dari Indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat mencapai target yaitu pada penyusunan rencana kasi Rb tematik, sesuai dengan rekomendasi penilaian Indeks RB Pemerintah Kabupaten Morowali dari Kementrian PAN RB yaitu :

- a. Memastikan rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB tematik instansi Pemerintah;
- b. Menyempurnakan Rencana Aksi yang meunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.

Pada Tujuan Strategis 1 Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih ada beberapa Sasaran Strategis :

Tabel 3.2.1

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN 2023 (%)	Ket
					2022	2023		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Nilai	(75)BB	CC(51,73)	CC(52,99)	74,63	Belum mencapai target
2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks kepuasan	Kategori	B	B	n/a		Belum rilis
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP	WTP			Belum rilis
4	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	Indeks	0,7647	Status Desa Mandiri = 3 Desa	22 Desa Status Desa Mandiri IDM =0,8165 s/d 0,8719	114,02	Melebihi Target
					Status Desa Maju = 36 Desa	Status Desa Maju =31 Desa IDM 0,7127 s/d 0,8129		
5		Persentase Status Desa Maju	%	12-13	28,6	24,6	189,23	

✚ Sasaran Strategis “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”

Pada Sasaran strategis 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1.1
Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Morowali

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	16,13	16,48
b. Pengukuran Kinerja	30	12,90	13,26
c. Pelaporan Kinerja	15	9,30	9,53
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,40	13,72
Nilai Hasil Evaluasi	100	51,73	52,99
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Adapun analisis faktor penyebab kegagalan nilai indikator belum mencapai target yakni :

- Berdasarkan hasil Evaluasi bahwa dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan diselaraskan dengan isu strategis daerah;
- Masih kurangnya kinerja Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah harus mencakup pencapaian kinerja, dan relevansi formulasi perhitungan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan;
- Penetapan target pada setiap indikator belum spesifik dalam pencapaian kinerja periode sebelumnya;
- Masih perlunya dorongan dalam melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja secara berkala dengan menyusun pedoman atau SOP

✚ Sasaran Strategis “Meningkatkan kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa”

Dari tabel 3.2.1 Sasaran strategis meningkatnya kualitas pembangunan dan pemberdayaan desa dapat dilihat melebihi target. Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan indikator Indeks Membangun Desa tersebut adalah : adanya peran desa dalam pembangunan Daerah yang terukur dalam indeks Desa Membangun (IDM). Dengan demikian persentase status desa maju mengalami peningkatan dengan capaian 189,23%.

No.	Sasaran Program Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Peningkatan Peran Desa dalam Pembangunan Daerah yang terukur dalam Indeks Desa Membangun (IDM)	Status Desa				
		Mandiri	%	2	22	
		Maju	%	20	31	
		Berkembang	%	59	49	
		Tertinggal	%	45	24	
		Sangat Tertinggal	%	0	0	

Sumber data : LKjIP DPMDP3A 2023

3.1. 2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis III “ Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Pengembangan UMKM, IKM dan Bumdes untuk mencapai kesejahteraan Bersama, dengan Tujuan Strategis II adalah Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan Bersama, capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Tujuan Strategis II

Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan Bersama								
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%)	Keterangan	Sumber Data
				2022	2023	2023		
2.1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	5-6	n/a	n/a			BPS (sulteng)
Sasaran Strategis (S.S) 2.1.1								
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi								
2.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	10-15	28,21	20,34	135,6	Mencapai Target	BPS (Morowali dalam Angka)
Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.2								
Tumbuhnya Investasi Daerah								
2.1.2.1	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	4-6	28	-26,58	-0,21	Belum mencapai target	Dinas Penanaman Modal - PTSP
Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.3								
Meningkatnya PDRB perkapita akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah								
2.1.3.1	PDRB Perkapita	Konstan Rp. (juta)	300-400	146.599,32	n/a		Belum mencapai target	BPS (Morowali dalam Angka)
Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.4								
Rendahnya Ketimpangan Pendapatan antar Masyarakat								
2.1.4.1	Gini Rasio	Indeks	0,30-0,24	0,285	0,281	106,33	Melebihi Target	Bapelitbangda

Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.5								
Menurunkan Jumlah Pengangguran								
2.1.5.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2-3	3,2	2,84	142	Melebihi Target	BPS Sulteng
Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.6								
Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan								
2.1.6.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100-102	101,75	101,75	101,75	Melebihi Target	Dinas Pertanian
2.1.6.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	106	102	100	94,34	Belum mencapai target	Dinas Perikanan
Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.7								
Meningkatkan Ketersediaan Pangan								
2.1.7.1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	86,00-88,00	85,3	85,3	99,19	Belum mencapai target	Dinas Pertanian
Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.8								
Menurunnya Penduduk Miskin								
2.1.8.1	Persentase Penduduk Miskin	%	12,40-9,8	12,58	12,31	100,7	Mencapai target	BPS (sulteng)
Sasaran Stretegis (S.S)2.1.9								
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								
2.1.9.1	Persentase PMKS Kebutuhannya	%	75-80	79	89,3	111,63	Melebihi Target	Dinas Sosial

Tujuan Strategis I Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan Bersama dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pencapaian misi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mengambil tujuan pembangunann daerah yaitu meningkatkan skala ekonomi daerah untuk kesejahteraan bersama dengan tolak ukur peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang hasil pengukurannya dikeluarkan oleh kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas. Adapun hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2023

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Morowali dari tahun 2019 sampai dengan 2021 cenderung mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan melampaui target dalam P-RPJMD 2018-2023, sementara untuk tahun 2022 dan 2023 masih menunggu rilis dari Bappenas.

Pada Tujuan Strategis 2 Meningkatkan skala ekonomi daerah untuk kesejahteraan bersama, memiliki beberapa Sasaran Strategis beserta Indikator kinerja utamanya

Tabel 3.3.1
Data Capaian Sasaran Strategis

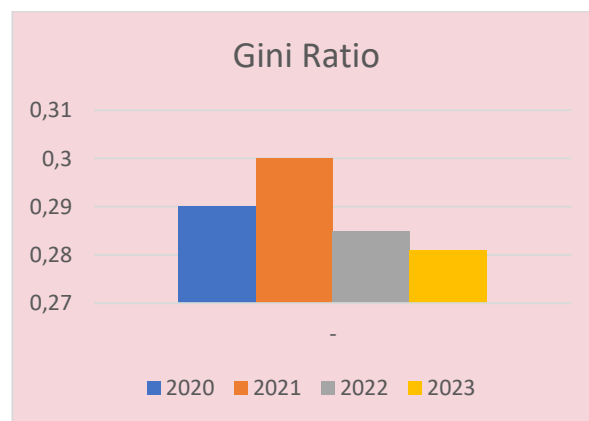
NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN 2023 (%)	Ket
					2022	2023		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	10-15	28,21	0		Belum rilis
2	Tumbuhnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	4-6	28	-26,58	-0,21	Belum mencapai target
3	Meningkatnya PDRB perkapita	PDRB Perkapita	Konstan Rp. (juta)	300-400	380	n/a		Belum rilis
4	Rendahnya Ketimpangan Pendapatan antar Masyarakat	Gini Rasio	Indeks	0,30-0,24	0,285	0,281	106,33	Melebihi Target
5	Menurunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2-3	3,2	2,84	142	Melebihi Target
6	Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100-102	101,75	101,75	101,75	Melebihi Target
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	106	102	100	94,34	Belum mencapai target
7	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	%	86,00-88,00	85,3	85,3	99,19	Belum mencapai target

8	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	%	12,40-9,8	12,58	12,31	100,7	Mencapai target
9	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PMKS Kebutuhan Dasarnya	%	75-80	79	89,3	111,63	Melebihi Target

✚ Sasaran Strategis “Rendahnya ketimpangan Antar Masyarakat”

Gini ratio adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara kelseuruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi, rentan skor 0-1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan nilai 1 terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan sama sekali.

Pada indikator kinerja Gini Ratio dengan capaian di tahun 2023 yakni 106,33% dari target yang telah di tentukan. Realisasi gini ratio di tahun 2023 juga di katakan berhasil karena melebihi target pada P-RPJMD 0,30-0,24. Hasil indikator gini ratio dapat dilihat pada grafik di bawah :



Sumber data LKjIP 2022

Dari grafik di atas terlihat bahwa di akhir tahun PRPJMD 2018-2023 indikator nilai Gini Ratio sangat baik, dari tahun 2022 gini ratio berada 0,285 dan di tahun 2023 menjadi 0,281, terjadi penurunan 0,004 poin sehingga di akhir P-RPJMD indikator gini ratio mencapai dengan capaian kategori baik karena Semakin kecil atau mendekati nol (0) nilai Gini menunjukkan semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi.

✚ Sasaran Strategis “Menurunnya Jumlah Pengangguran”

Pada tabel 3.2.1 di atas indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 dengan capaian 142% dan capaian ini melebihi target pada PRPJMD 2018-2023 yakni antara 2-3% dan realisasi 2,84%. Berikut grafik perbandingan tahun sebelumnya :



Sumber data LKjIP 2022

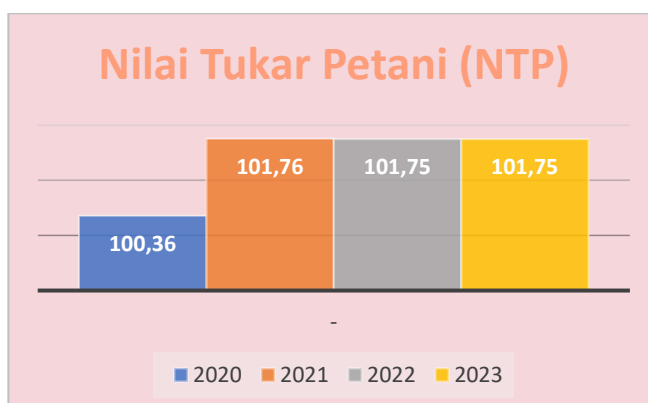
Dari grafik di atas tentunya dapat terlihat bahwa indikator tingkat pengangguran dari tahun 2020 sampai dengan di tahun terakhir tahun 2023 terjadi peningkatan, sehingga di akhir PRPJMD tahun 2023 indikator tingkat pengangguran adalah 2,84%.

✚ Sasaran Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan”



Nilai Tukar Petani

Indikator Nilai Tukar Petani di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3.1 di atas capain dari indikator tersebut adalah melebihi target dengan capain 101,75%. Berikut grafik/bagan nilai tukar petani dari tahun sebelumnya.



Sumber data LKjIP 2022

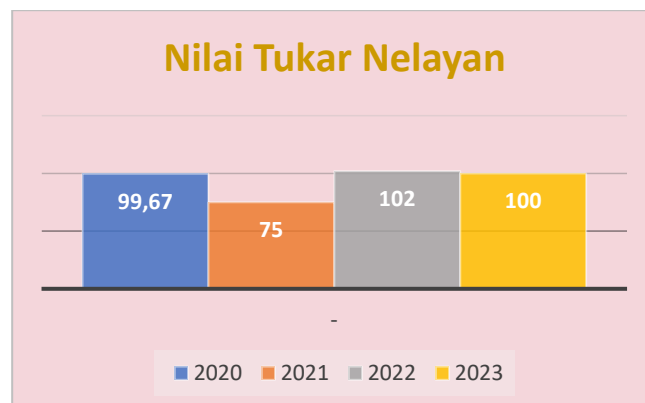
Dari grafik/bagan di atas dapat terlihat bahwa nilai tukar petani tertinggi di tahun 2021 yakni 101,76% dan di tahun 2022 dan 2023 Nilai tukar petani di angka 101,75%.

Analisis Faktor Kegagalan indikator Nilai tukar Petani hingga belum mencapai target pada PRPJMD 2018-2023 adalah :

- a. Belum pengelolaan lahan pertanian bidang
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna yang belum optimal
- c. Petani masih tergantung pada pupuk subsidi
- d. Pola tanam petani belum maksimal

Nilai Tukar Nelayan

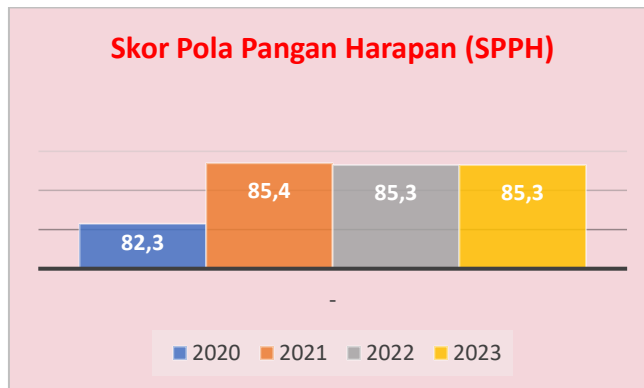
Indikator Nilai Tukar Nelayan pada tabel 2.3.1 adalah 100%. Di banding dengan target pada PRPJMD 2018-2023 adalah 106 maka Nilai tukar nelayan belum memenuhi target. Perbandingan tahun sebelumnya dan tahun sekarang pada indikator Nilai Tukar Nelayan dapat dilihat pada bagan di bawah :



Sumber data LKjIP 2022

Dari grafik/bagan di atas dapat terlihat Nilai Tukar Nelayan tertinggi adalah di tahun 2022 dan di tahun 2023 capaian NTN hanya berada di angka 100% dengan target pada PRPJMD 2018-2023 adalah 106%. Adapun Analisis kegagalan dari pencapaian Nilai Tukar Nelayan tahun 2023 adalah masih kurangnya sumber daya baik personil maupun keahlian dan faktor sarana dan prasarana serta penyesuaian aktifitas.

✚ Sasaran Strategis “ Meningkatkan Ketersediaan Pangan”



Pada tabel 3.2.1 indikator Skor Pola Pangan Harapan dengan capaian di tahun 2023 adalah 99,19, Dengan realisasi 85,30. Pada grafik/bagan diatas kenaikan Skor Pola Pangan Harapan tidak mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya.

Pengukuran skor PPH ketersediaan merupakan instrumen yang menunjukkan ketersediaan pangan yang ideal di suatu wilayah termasuk Kabupaten Morowali. Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan merupakan pola tentang ketersediaan pangan di suatu wilayah berbasis pola ketersediaan ideal yang mengacu pada pola pangan harapan. Pangan yang tersedia secara beragam dalam jumlah seimbang akan mampu menyediakan kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah-buahan serta lain-lain.

Situasi ketersediaan energi di Kabupaten Morowali telah melebihi standar yang dianjurkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 sebesar 2100 kkal/kap/hari. Kontribusi terbesar dari ketersediaan energi tersebut berasal dari pangan nabati yaitu sebesar 91,50 % sedangkan yang berasal dari pangan hewani hanya 8,50 %.

Sedangkan untuk ketersediaan protein telah melebihi standar yang dianjurkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 sebesar 63 gram/kap/hari yaitu 109 gram/kap/hari.

Kontribusi terbesar dari ketersediaan protein tersebut berasal dari pangan nabati yaitu sebesar 73,39% sedangkan yang berasal dari pangan hewani sebesar 26,61%.

Adapun Analisis keberhasilan pada indikator kinerja Skor pola pangan Harapan antara lain :

- a. Tersedianya data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga yang diolah sebagai bahan untuk mengukur ketersediaan pangan di daerah.
- b. Tersusunnya laporan Neraca Bahan Makanan yang menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (Negara/Provinsi/Kabupaten) pada waktu tertentu.
- c. Telah dilaksanakannya intervensi penanganan kerawanan pangan berdasarkan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas).
- d. Terlaksananya sinkronisasi program/kegiatan lintas OPD melalui Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali guna mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah.

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan/kendala dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Belum optimalnya pengelolaan keberadaan lumbung pangan masyarakat di daerah.
- b. Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi masalah kekurangan pangan di daerah rawan pangan.
- c. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama menjelang/menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional.

✚ Sasaran Strategis “ Menurunnya Penduduk Miskin”



Sumber data : LKjIP 2022

Dari grafik di atas terlihat terjadi penurunan di akhir P-RPJMD 2018-2023, yakni berada di angka 12,31% namun jika dilihat pada target P-RPJMD antara 12,41-9,8 Menurunnya angka kemiskinan masih melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data BPS Indikator Persentase Penduduk Miskin dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Sulawesi Tengah	13,00	12,33	12,41
Banggai Kepulauan	13,72	13,44	12,90
Banggai	7,83	7,33	6,94
Morowali	13,75	12,58	12,31
Poso	15,92	15,18	15,16
Donggala	16,73	16,30	16,25
Tolitoli	13,51	12,74	12,85
Buol	14,06	12,85	13,36
Parigi Moutong	15,28	14,63	14,91
Tojo Una-una	16,60	16,12	16,74
Sigi	13,05	12,30	12,83
Banggai Laut	14,17	13,17	14,15
Morowali Utara	13,90	12,97	12,85
Kota Palu	7,17	6,63	6,56

Sumber data BPS Sulteng

✚ Sasaran Strategis “ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

Pada tabel 3.2.1 Indikator Kinerja Persentase PMKS Kebutuhan dasarnya di tahun 2023 dengan capaian 111,63% yakni melebihi target. Perbandingan dari tahun sebelumnya dapat di lihat pada grafik di bawah ini :



Sumber data :LKjIP 2022

Dari grafik diatas terlihat persentase PMKS tertinggi kebutuhan dasarnya ada di tahun 2021 dengan nilai 93%, dan di akhir tahun P-RPJMD persentase PMKS dia angka 89,3% dan dibandingkan dengan target pada P-RPJMD 2018-2023 yaitu 75-80% dapat di katakan berhasil melebihi target yang telah di tentukan.

Dari Analisis bahwa Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 melampaui target, hal ini disebabkan adanya komitmen Pemerintah dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan dukungan anggaran bantuan PKH, Bantuan Sembako, Bantuan PBI, Bantuan Anak Yatim, Bantuan Gercep Gaskan Berdaya, bantuan alat bantu penyandang cacat merupakan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial dan Propinsi melalui APBD I dan Bantuan Keuangan Program ini menyasar penduduk miskin yang pencatatannya masuk dalam DTKS dan data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstreem (P3KE).

3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis III “ Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Misi III Mewujudkan pelayanan pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas melalui pembiayaan gratis, berlandaskan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama, dengan Tujuan Strategis III adalah Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Tujuan Strategis III

TUJUAN STRATEGIS (T.S) III								
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)								
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%)	Keterangan	Sumber Data
				2022	2023	2023		
3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,00-76,00	73,39	73,82	98,43	Belum mencapai target	Bappelitbangda
Sasaran Strategis (S.S) 3.1.1								
Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam Meciptakan Generasi Muda yang Imtaq								
3.1.1.1	Indeks Pendidikan	Indeks	50,00-55,00	n/a	n/a	n/a		
3.1.1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,30-14,50	13,36	13,38	93,57	Belum mencapai target	Bappelitbangda
3.1.1.3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10-10,30	9,35	9,37	93,7	Belum mencapai target	Bappelitbangda
Sasaran Stretegis (S.S) 3.1.2								
Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan								
3.1.2.1	Indeks Kesehatan	Indeks	69,50-70	0,4	0,43	0,62	Belum mencapai target	Dinas Kesehatan
3.1.2.2	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50-70	54	85,3	121,86	Melebihi target	Dinas Kesehatan
3.1.2.3	Angka Stunting	Persen	6,60-6,10	5,7	6,7	101,52	Melebihi target	Dinas Kesehatan
Sasaran Stretegis (S.S) 3.1.3								

Meningkatnya Partisipasi Oraganisasi Kepemudaan dan Prestasi Olahraga Daerah								
3.1.3.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepemudaan	Persen	100	20	25	25	Belum mencapai target	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata
3.1.3.2	Peningkatan Partisipasi olahraga	Jumlah Medali Juara	37	9	10	27,03	Belum mencapai target	
Sasaran Stretegis 3.1.4								
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah								
3.1.4.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85-90	85,14	n/a		Belum Rilis	BPS
Sasaran Stretegis (S.S) 3.1.5								
Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal								
3.1.5.1	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	%	75-80	n/a	n/a		Belum rilis	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.1.5.2	Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	%	75-80	n/a	n/a		Belum Rilis	
Sasaran Stretegis (S.S) 3.1.6								
Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Beragama Kabupaten Morowali								
3.1.6.1	Indeks Kerukunan Beragama	Indeks	70-80	n/a	n/a		Belum Rilis	

Dalam pencapaian misi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mengambil tujuan pembangunan daerah yaitu Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia (SDM) dengan tolak ukur peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hasil pengukurannya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3. 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2023

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian IPM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan di akhir P-RPJMD 2018-2023 nilai Indeks Pembangunan Manusia sangat meningkat yakni 97,6%.

Sejak tahun 2010, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dengan metode baru, komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Tercapainya indikator tujuan startegis ke III juga didukung oleh 12 (dua belas) Indikator sasaran strategis. Berikut tabel Sasaran strategis beserta Indikator kinerja utama :

Tabel 3.4.1
Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan III

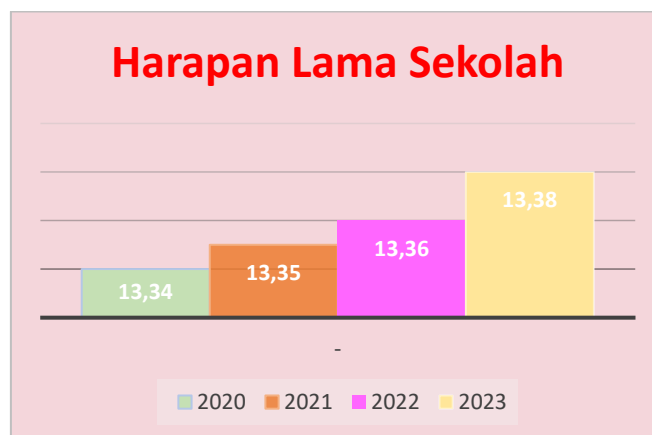
NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN 2023 (%)	Ket
					2022	2023		
1	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam Meciptakan Generasi Muda yang lmtaq	Indeks Pendidikan	Indeks	50,00-55,00	n/a	n/a	n/a	Tidak terukur
2		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,30-14,50	13,36	13,38	92,28	Belum Mencapai Target
3		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10-10,30	9,35	9,37	90,97	Belum Mencapai Target
4	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	69,50-70	0,8	0,43	0,62	Belum Mencapai Target
5		Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50-70	54	85,3	121,86	Melebihi target
6		Angka Stunting	Persen	6,60-6,10	5,7	6,7	101,52	Melebihi target
7	Meningkatnya Partisipasi Oraganisasi Kepemudaan dan Prestasi Olahraga Daerah	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepemudaan	Persen	100	60	25	67,57	Belum Mencapai Target
8		Peningkatan Partisipasi olahraga	Jumlah Medali Juara	37	90	5	13,51	Belum Mencapai Target

9	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85-90	85,14	n/a		Belum rilis
10	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	%	75-80	n/a	n/a		Belum rilis
11		Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	%	75-80	n/a	n/a		Belum rilis
12	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Beragama Kabupaten Morowali	Indeks Kerukunan Beragama	Indeks	70-80	n/a	n/a		Tidak terukur

Sasaran Strategis “ Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam menciptakan Generasi Muda yang Imtaq Harapan Lama Sekolah

Pada Indikator Harapan Lama Sekolah pada akhir PRPJMD terlihat mengalami peningkatan di banding tahun 2022 sehingga capaian di akhir PRPJMD adalah 92,28% dari target yang pada P-RPJMD yakni diantara 14,30-14,50. Berikut perbandingan nilai dari indikator kinerja utama Harapan Lama Sekolah dari sasaran strategis meningkatnya standar pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dalam menciptakan Generasi Muda yang Imtaq :

Grafik 3.1 Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah (HLS)



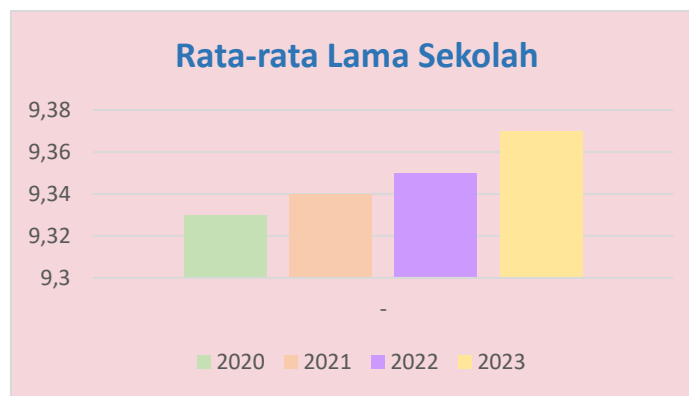
Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator yang memegang peranan penting dalam melakukan pengukuran IPM, di kabupaten Morowali HLS pada tahun 2023 berada pada angka 13,38 ini mengartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,38 tahun atau setara dengan Diploma I. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023 persentase realisasi HLS mencapai 92,28 persen dari target RKPDP tahun 2023. Secara umum pencapaian Indikator HLS selama 5 tahun terakhir di kabupaten morowali mengalami peningkatan secara terus menerus namun peningkatan ini tidak begitu signifikan sehingga perlu adanya upaya dan perhatian dari pemerintah daerah dalam meningkatkan HLS di kabupaten morowali. Saat ini pemerintah daerah melalui dinas Pendidikan juga telah memberikan

bantuan Pendidikan gratis bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Untuk tahun 2023 terdapat 3.214 mahasiswa yang mendapatkan bantuan Pendidikan dari pemerintah daerah

Rata-rata Lama Sekolah

Berikut Grafik Indikator Rata-rata Lama sekolah dari tahun 2020 sampai dengan tahun terakhir P-RPJMD 2018-2023 :

Grafik 3.1
Rata-rata Lama sekolah



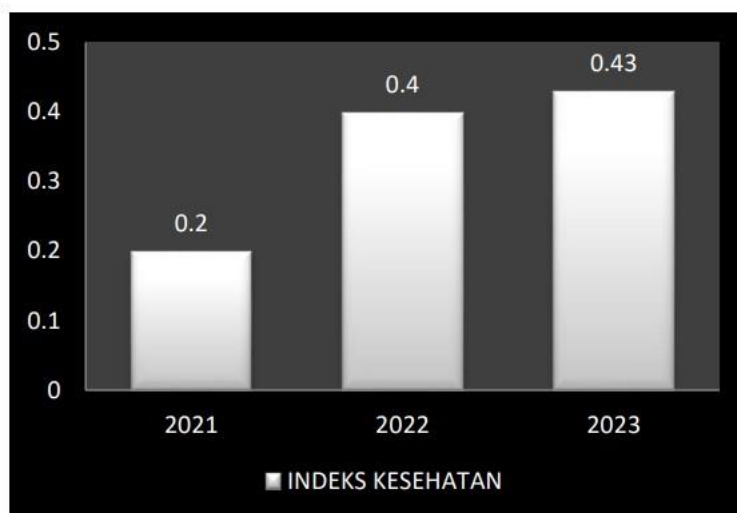
Dari grafik diatas dapat terlihat Indikator Rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan di akhir PRPJMD 2018-2023 indikator rata-rata lama sekolah meningkat secara signifikan.

Rata-Rata Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Jika melihat pencapaian indikator ini pada tahun 2023 berada pada angka 9,37 Ini berarti rata-rata tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali adalah setara kelas tiga SMP/Sederajat. Dari capaian ini menunjukkan bahwa secara umum, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali telah sepenuhnya tuntas pendidikan dasar sembilan tahun. berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023 persentase realisasi RLS mencapai 90,97 persen dari target RKPD tahun 2023. Secara umum pencapaian Indikator RLS selama 5 tahun terakhir di kabupaten morowali juga mengalami peningkatan secara terus menerus namun peningkatan ini tidak begitu signifikan. Kendala yang dihadapi saat ini adalah penambahan penduduk yang begitu signifikan sehingga ruang kelas belajar yang tersedia saat ini masih sangat terbatas sehingga diperlukan upaya dari pemerintah dalam

menyediakan sarana, prasarana maupun fasilitas pendidikan di kabupaten morowali.

Sasaran Strategis “ Terpenuhiya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Indeks Kesehatan



Sumber data : LKjIP Dinas Kesehatan

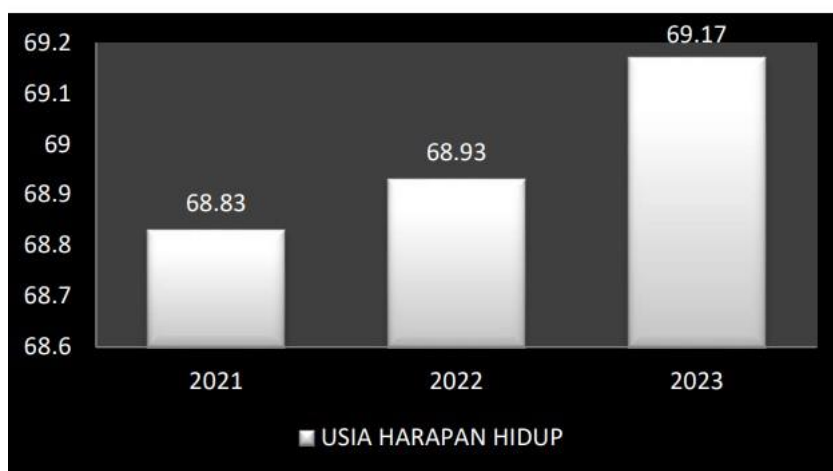
Indeks Kesehatan di kabupaten morowali masih kategori tidak sehat hal tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain kurang updatenya pada aplikasi pendataan PIS-PK yang di akibatkan oleh kendala jaringan sehingga tidak ter update secara berkala dan masih belum optimalnya pelayanan kesehatan yang dikarenakan kurangnya sarana prasarana serta pendukung pelayanan kesehatan sesuai standard Selain itu gaya hidup sebagian besar masyarakat belum mengarah ke pola hidup sehat sehingga kurang mendukung peningkatan indeks kesehatan. Pola hidup tersebut antara lain kebiasaan merokok, Konsumsi sayur dan buah yang kurang, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan cek kesehatan secara rutin yang rendah.

Indeks Kesehatan, indikator ini merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi nilai indeks pembangunan manusia oleh United National Development Programe (UNDP). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap indicator ini pada RKPD Kabupaten Morowali tahun 2023 mencapai indeks 75,95 atau 109,29 dari target RKPD yang ditetapkan yaitu pada indeks 69,50-70,00. pencapaian ini merupakan

kategori sangat tinggi mengingat berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Morowali antara lain Penjaminan Kesehatan Gratis melalui BPJS Kesehatan sebanyak 33.355 jiwa dengan alokasi anggaran Rp. 14.991.480.000,00. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan Puskesmas baru di Pulau Umbele kec. Bungku selatan dan menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, sampai dengan tahun 2023 tenaga kesehatan yang ada sebanyak 1.620 orang yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan pencapaian ini bukan berarti pemerintah daerah tidak mendapatkan hambatan dan kendala salah satu tantangan yang dihadapi saat ini yaitu dengan tingginya pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan terbatasnya sarana dan prasana kesehatan dan penyediaan obat-obatan, sehingga masih perlu upaya dan kerja keras dari pemerintah daerah dalam menangani hal ini.

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) masih rendah di Kabupaten Morowali disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kematian neonatus (bayi) masih cukup tinggi (34 kematian bayi), kematian yang disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular cukup tinggi, rendahnya cakupan skrining kesehatan bagi lansia dan akses pelayanan kesehatan yang belum maksimal di beberapa daerah sulit (wilayah kepulauan). Berikut Grafik Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) dari tahun sebelumnya :



Dari grafik di atas tentunya terlihat nilai Indikator Usia Harapan Hidup dari tahun 2021 hingga akhir P-RPJMD 2018-2023 nilai indikator tersebut meningkat. Namun belum memenuhi target pada akhir P-RPJMD antara 69,50-70 tahun.

Kegagalan Peningkatan rata-rata Umur Harapan Hidup dari rencana kinerja 70 tahun hanya dapat terealisasi sebesar 69 tahun. Salah satu indikator pokok untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah Umur Harapan Hidup. Umur yang panjang namun tidak berkualitas (mengalami sakit kronis) akan membawa konsekuensi logis pada perubahan pola penyakit degeneratif yang timbul. Strategi untuk meningkatkan Capaian Usia Harapan Hidup di tahun berikutnya adalah melalui pelaksanaan program PHBS, peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit, peran SDM kesehatan pada desa siaga serta penyehatan lingkungan.

Angka Stunting

Angka Stunting atau stunting adalah keadaan saat balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan usia dan jenis kelamin yang diukur dengan standar pertumbuhan anak dari WHO. Masalah stunting di kabupaten morowali merupakan masalah kesehatan yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah daerah, hal tersebut dibuktikan dengan prevalensi stunting kabupaten morowali pada tahun 2022 hanya mengalami penurunan sebesar 5,6 persen dari angka stunting tahun sebelumnya sebesar 28,9 persen. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023 penurunan stunting mencapai 6,60-6,10 persen, capaian ini masih menggunakan data sementara sambil menunggu data hasil survey Gizi Indonesi (SSGI) yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan RI. Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp. 42.773.372.372 yang terdiri dari APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 31.819.459.512 dan Dana Transfer (DAK, DAU, DBH, DID, Dll) sebesar Rp. 10.953912.860. Adapun upaya atau langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh

pemerintah daerah dalam hal menurunkan angka stunting di kabupaten morowali adalah dengan pemberian makanan tambahan pada balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.500/Orang selama 90 hari dan pendampingan balita stunting dan keluarga beresiko stunting. Dalam hal menurunkan stunting pemerintah daerah akan terus berupaya dan menjadikan sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan RKPD tahun 2025. Berikut grafik peningkatan Indikator Kinerja Utama Angka Stunting dari tahun 2020 sampai dengan akhir P RPJMD 2018-2023



Penurunan Prevalensi Stunting di kabupaten Morowali dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. berdasarkan data PSG (Pemantauan Status gizi) Kemenkes pada tahun 2017, jumlah balita Stunting mencapai 3608 balita (34%), berdasarkan data RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) Kemenkes pada tahun 2018, Prevalensi balita stunting yaitu 30,40%. Sedangkan Pada tahun 2019 menurut data e-PPGBM balita stunting yaitu 1042 (12%), pada tahun 2020 data per agustus yaitu 849 balita (7.8%), Selanjutnya pada tahun 2023 Kabupaten Morowali mengalami penurunan yaitu pada bulan Desember 2023 menjadi 6,7% (648 Balita), hal tersebut di tunjang dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah baik dari segi penyediaan sarana pelayanan, SDM Kesehatan yang terstandar juga Logistik untuk mendukung jalannya kegiatan penurunan stunting Pelaksanaan Interveni Spesifik Maupun Sensitif juga dilaksanakan secara konfergensi oleh Lintas Program dan Lintas Sektor.

Hal ini juga di dukung oleh beberapa faktor adalah pendidikan dan pengetahuan orang tua sudah meningkat terutama masalah

kesehatan dan gizi yang diperoleh melalui informasi-informasi baik melalui penyuluhan langsung maupun dari media-media yang ada, selain itu upaya penurunan status gizi kurang telah dilakukan yaitu dengan dukungan program upaya perbaikan gizi masyarakat (UPGK) dengan kegiatan penimbangan balita setiap bulannya di posyandu yang disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemberian makanan tambahan baik PMT penyuluhan maupun PMT pemulihan dan perawatan bagi penderita gizi kurang/buruk yang memerlukan perawatan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Organisasi Kepemudaan dan Prestasi Olah raga Daerah

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepemudaan

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan, berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2023 realisasi terhadap indikator ini masih sangat rendah atau hanya mencapai 25 persen dari target yang telah di tetapkan, sehingga diperlukan upaya oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan parsipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan. Berikut grafik realisasi indikator kinerja tingkat Partisipasi pemuda dalam kepemudaan :



Sumber data LKjIP Dinas Pemuda Olahraga

Dari grafik di atas bahwa indikator tersebut setiap tahunnya meningkat. Dan diakhir P-RPJMD tingkat partisipasi pemuda dalam kepemudaan adalah 25%, namun pada akhir periode P-RPJMD belum memenuhi target.

Peningkatan Partisipasi Olahraga

Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2023 realisasi terhadap indikator ini masih sangat rendah atau hanya mencapai 13,51 persen dari target yang telah di tetapkan, Pada tahun 2023 kabupaten morowali hanya mendapatkan 5 (lima) medali juara dari semua even olahraga yang diikutui, sehingga diperlukan upaya oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Morowali melalui peningkatan kulaitas atlit yang ada saat ini dan peningkatan sarana maupun prasarana olahraga. Berikut di sajikan grafik realisasi peningkatan partisipasi olahraga dari tahun 2020 sampai dengan akhir periode P-RPJMD 2018-2023 :

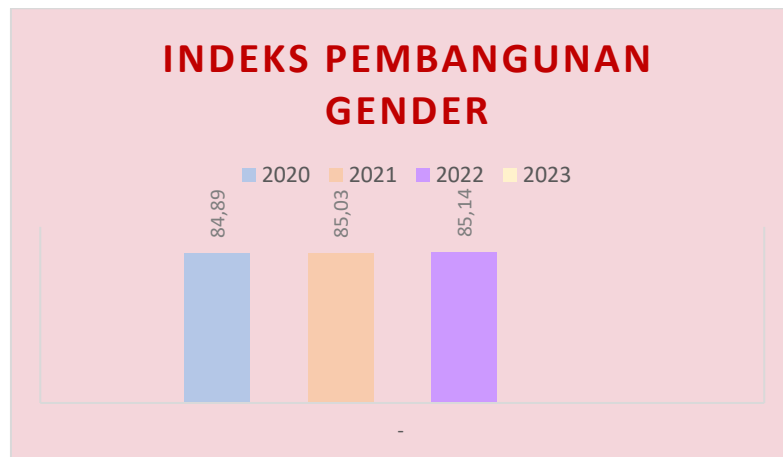


Sumber data LKjIP Dinas Pemuda Olahraga

Dari grafik di atas terlihat angka peningkatan partisipasi Olahraga terjadi peningkatan sampai akhir periode P-RPJMD 2018-2023, namun dari target P-RPJMD angka peningkatan partisipasi mencapai 27,03% sehingga indikator peningkatan partisipasi Olahraga belum memenuhi target pada akhir P-RPJMD 2018-2023.

Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah

Pada sasaran startegis meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Gender (IPG).



Berdasarkan grafik di atas indeks pembangunan gender dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan, untuk tahun 2023 Indeks Pembangunan gender masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

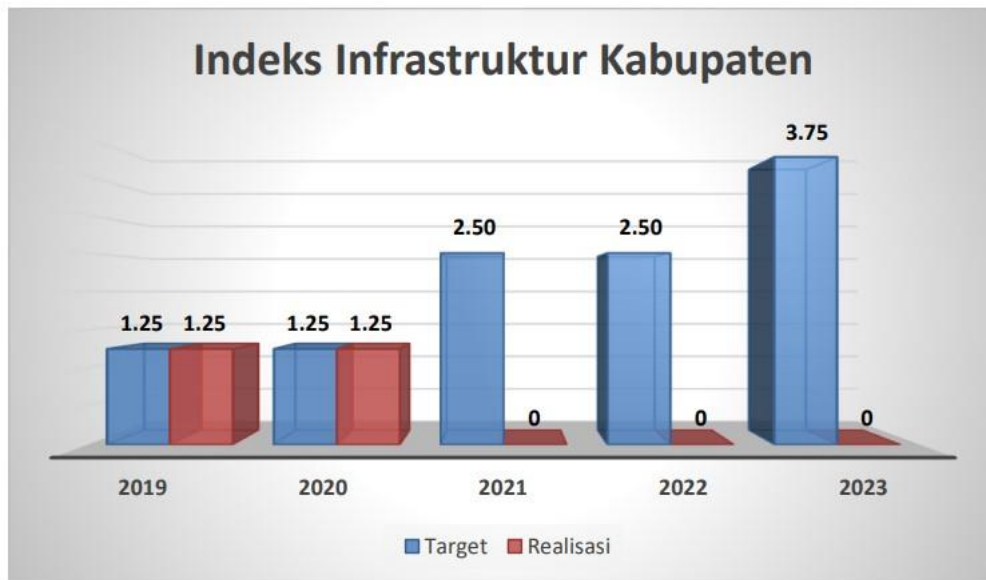
3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis IV “ Meningkatkan Kualitas Infrasturktur Dasar

Misi IV Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah sehingga Mengurangi Kesenjangan Wilayah dan Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Bahagia, dengan Tujuan Strategis IV adalah Menigkatkan Kualitas Infra struktur Dasar dengan Indikator Kinerja Utama yaitu indeks Infrastruktur Kabupaten, capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Tujuan Strategis IV

TUJUAN STRATEGIS (T.S) IV									
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar									
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%)	Keterangan	Sumber Data	
				2022	2023	2023			
4.1	Indeks Infrastruktur Kabupaten	Kategori (Nasional)	1,51-3,75 (Tinggi)	n/a			Belum rilis		
	Sasaran Strategis (S.S) 4.1.1								
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar daerah								
	4.1.1.1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	25,550-30,00	30,95	40,48	134,93	Melebihi Target	Dinas PUPR
	4.1.1.2	Rasio Elektrifikasi	%	99,00-99,20	98,17	98,3	99,29	Belum mencapai target	Bapelitbangda
	4.1.1.3	Persentase Rumah Layak Huni	%	80-85	100	87	102,35	Melebihi Target	Dinas Perumahan
	4.1.1.4	Persentase RT berakses air bersih	%	90-92	84,87	91,88	100,97	Melebihi Target	Dinas PUPR
	Sasaran Stretegis (S.S) 4.1.2								
	Meningkatnya Pemanfaatn Teknologi Informasi dan Komunikasi								
	4.1.2.1	Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	%	90-95	92,41	93,3	103,67	Melebihi Target	Dinas Kominfo
4.1.2.2	Perentase koneksi internet Desa	%	80-90	86,33	88,24	110,3	Melebihi Target		

Dalam pencapaian misi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan tujuan pembangunan daerah yaitu Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dengan tolak ukur peningkatan Indeks Infrastruktur Kabupaten. Adapun hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber data : Dokumen Evaluasi P-RPJMD 2018-2023

Tercapainya Indikator Indeks Infra struktur Kabupaten pada Tujuan startegis IV ini juga di dukung oleh beberapa indikator, berikut lima (5) indikator sasaran satrategis :

Tabel 3.5.1
Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan IV

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN 2023 (%)	Ket
					2022	2023		
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar daerah	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	25,550-30,00	30,95	40,48	134,93	Melebihi Target
2		Rasio Elektrifikasi	%	99,00-99,20	98,17	98,3	99,29	Belum mencapai target
3		Persentase Rumah Layak Huni	%	80-85	100	87	102,35	Melebihi Target
		Persentase RT berakses air bersih	%	90-92	84,87	91,88	100,97	Melebihi Target
4	Meningkatnya Pemanfaatn Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	%	90-95	92,41	87,3	97	Belum mencapai target
5		Perentase koneksi internet Desa	%	80-90	86,33	38,46	48,075	Belum mencapai target

Sasaran Strategis “Meningkatkan kualitas Infrastruktur Dasar Daerah”

Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Berikut di sajikan grafik peningkatan realisasi indikator Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik dari tahun 2020 sampai dengan di akhir P-RPJMD tahun 2023 :



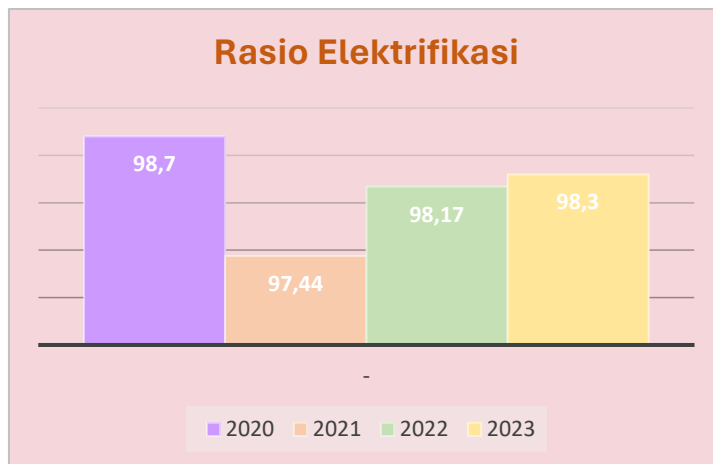
Dari grafik di atas terlihat nilai tertinggi yaitu di tahun 2021, namun di tahun 2023 indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat dikatakan berhasil melebihi target yang telah di tentukan pada P-RPJMD 2018-2023 yakni berkisar antara 25,550-30,00 dan realisasi tahun 2023 adalah 40,48% dengan capaian 134,93%. Sehingga capaian pada indikator ini adalah sangat baik.

Pencapaian tersebut merupakan kontribusi dari kegiatan peningkatan jalan tahun 2023 sepanjang 68,37 KM jalan yang ditingkatkan dan dilaksanakan di beberapa ruas di antaranya peningkatan ruas jalan Atananga lambelu-Limbomamur, ruas jalan Bahoea-Trans Kabera, ruas jalan dalam desa Bahodopi, ruas jalan dalam desa bahomakmur, ruas jalan dalam desa kolono, Ruas jalan dalam desa lambelu, ruas jalan dalam desa Limbo Makmur, ruas jalan dalam desa makarti jaya, jalan lingkar atas emea-uedago, ruas jalan lingkar menui, Ruas jalan lingkar Pulau paku Kaleroang, ruas jalan Umpanga -trans Umpanga.

Rasio Elektrifikasi

Pada Indikator Rasio elektrifikasi yang merupakan indikator pendukung dari sasaran stretegis meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut diakhir P-RPJMD 2018-2023 hampir mencapai target, capaian yakni : 98,3% dari target pada P-RPJMD antara 99,00%-99,20 %.

Berikut grafik realisasi Indikator Rasio Elektrifikasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 20203 :



Persentase Rumah Layak Huni

Persentase rumah layak huni juga merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, berikut di sajikan grafik perbandingan realisasi capaian indikator tersebut :

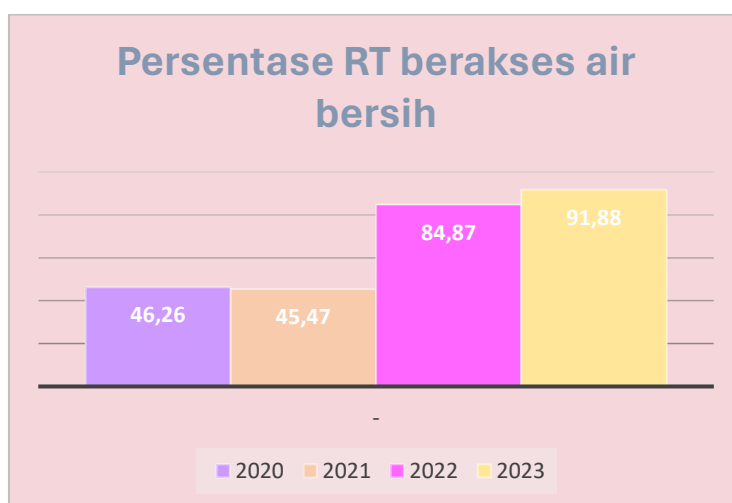


Dari grafik diatas tentunya terlihat persentase tertinggi dari indikator tersebut berada di tahun 2021 dengan realisasi 99,57%. Di akhir tahun P-RPJMD 2018-2023 indikator dengan realisasai 87% mengalami penurunanjika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022. Namun di akhir P-RPJMD persentase ini melebihi target yang telah di ditetapkan dengan capaian 102,3% seperti pada tabel sasaran startegis di atas. Adapaun indikator pendukung keberhasilan persentase rumah layak huni yaitu :

- Jumlah ruma layak huni yang tertangani dari sebanyak 444 unit dari target 400 unit rumah yang tertangani
- Jumlah rumah yang dibangun/rehab pasca bencana terealisasi 12 unit dari 20 unit target yang telah di tentukan
- Jumlah pembangunan rumah bagi korban yang terkena bencana terealisasi 18 unit rumah yang telah di bangun.

Persentase RT berakses Air Bersih

Capaian Indikator Persentase RT berakses Air bersih dihitung berdasarkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih di wilayah Kabupaten Morowali yaitu Jumlah penduduk dengan akses air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dibagi jumlah penduduk seluruhnya di kabupaten morowali. Berikut grafik perbandingan persentase RT berakses air bersih dari tahun 2020 sampai kahir P-RPJMD 2023 :



Dari grafik di atas jelas terlihat bahwa dari tahun ke tahun persentase RT berakses air bersih meningkat, di akhir tahun 2023 realisasi 91,88% dari target P-RPJMD 2018-2023 adalah 90-92% dengan capaian 100,97% sehingga dapat dikatakan baik sekali karena melebihi target P-RPJMD 2018-2023.

Sasaran Strategis “Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”

Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi



Dari grafik di atas terlihat di akhir P-RPJMD 2018-2023 persentase Desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi meningkat setiap tahunnya dengan realisasi 98,3% dari target 90-95% dengan capaian adalah 103,67%. Adapun pendukung keberhasilan indikator tersebut yaitu :

- ✓ Tersedianya 14 BTS Bakti komunikasi dan Informatika
- ✓ Adanya dukungan dari perkembangan wilayah yang mendorong provider telekomunikasi untuk ikut serta.

Persentase koneksi internet Desa



Dari grafik di atas terlihat persentase koneksi internet desa dari tahun sebelumnya hingga di akhir P-RPJMD 2018-2023 mengalami peningkatan, di tahun 2023 realisasi persentase koneksi internet desa adalah 88,24% dari target P-RPJMD 80-90% sehingga capaian di tahun akhir P-PRIMD 2018-2023 adalah 110,3% sehingga capaian tersebut sangat baik karena melebihi target yang telah di tentukan. Keberhasilan tersebut tentunya di dukung oleh beberapa faktor yaitu : telah tersosialisasi dan terbentuknya kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Desa.

3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis V “ Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Berkurangnya Resiko Bencana

Misi IV Mewujudkan Lingkungan Hidup berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim dan bencana, dengan Tujuan Strategis V adalah Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Berkurangnya Risiko Bencana dengan Indikator Kinerja Utama yaitu indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

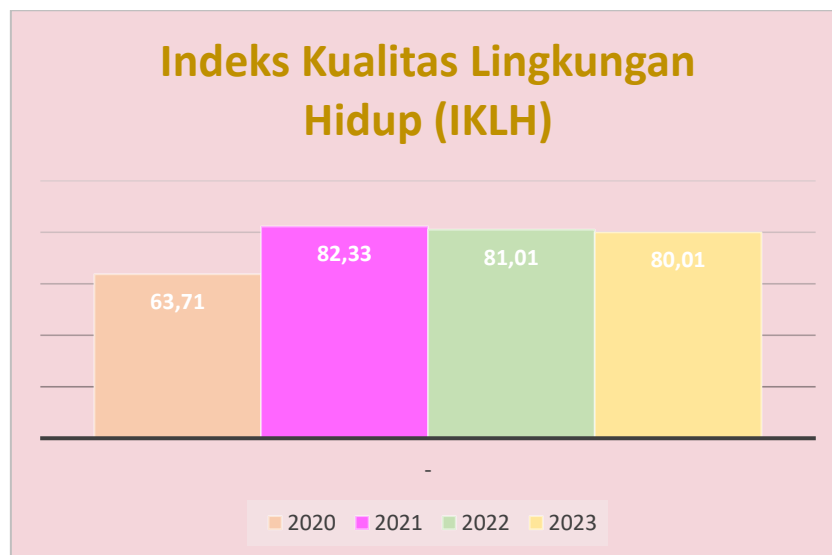


Tabel 3.6
Capaian Indikator Tujuan Strategis V

TUJUAN STRATEGIS (T.S) V									
Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Berkurangnya Resiko Bencana									
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%)	Keterangan	Sumber Data	
				2022	2023	2023			
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55-60	81,01	80,01	133,35	Melebihi target	Dinas Lingkungan Hidup	
	Sasaran Strategis (S.S) 5.1.1								
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup								
	5.1.1.1	Indeks rawan Bencana	Indeks	90-95	174,82			Belum rilis	Data IRB
	5.1.1.2	Persentase Desa Tangguh Bancana	%	19,84-23,80	2,38	7,94	40,02	Belum mencapai target	Bappelitbangda
	Sasaran Strategis (S.S) 5.1.2								
	Meningkatnya Layanan Kebersihan dan Penataan Lingkungan Kota Bungku								
	5.1.2.1	Cakupan pelayanan persampahan kota	%	100	77	49,41	49,41	Belum mencapai target	Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran Strategis (S.S) 5.1.3								
	Meningkatnya Respon dan Layanan kebakaran kabupaten								
5.1.3.1	Cakupan layanan kebakaran skala kabupaten	%	100,00	100	n/a	n/a	Tidak Terukur	Damkar	
Sasaran Stretegis (S.S) 5.1.4									
Menurunnya Gangguan ketentraman dan Ketertiban									

	5.1.4.1	Angka kriminalitas	%	8-5	436			tidak mencapai target	Belum dirilis
--	---------	--------------------	---	-----	-----	--	--	-----------------------	---------------

Dalam pencapaian misi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan tujuan pembangunan daerah yaitu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dengan Indikator kinerja utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), adapun hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber data : LKjIP 2023 dinas Lingkungan Hidup

Dari Grafik di atas terlihat IKLH tertinggi yaitu di tahun 2021 dengan realisasi mencapai 82,33. Namun di akhir P-RPJMD 2018-2023 IKLH juga masih melebihi dari target yang telah di tentukan dengan indeks 55-60 sehingga realisasi IKLH adalah 80,01 dan capaian 133,35% dengan kategori Baik sekali.

Adapun yang faktor pendukung keberhasilan dari Indikator tersebut adalah :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

- d. Adanya peraturan perundangan yang mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan.
- e. Adanya kedisiplinan pelaku usaha/kegiatan untuk memperkecil pencemaran lingkungan, dan intensifnya pengawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah.
- f. Adanya peraturan perundangan beserta sanksi pelanggaran yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah
- g. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

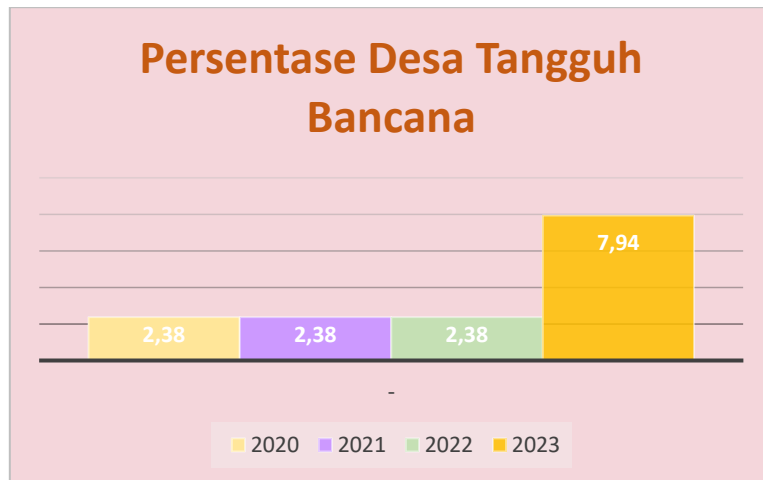
Dalam mewujudkan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) di dukung beberapa sasaran strategis dan indikatornya, berikut di sajikan dalam tabel :

Tabel 3.6.1
Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan IV

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN 2023 (%)	Ket
					2022	2023		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks rawan Bencana	indeks	90-95	174,82			Belum rilis
2		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	19,84-23,80	2,38	7,94	40,02	Belum rilis
4	Meningkatnya Layanan Kebersihan dan Penataan Lingkungan Kota Bungku	Cakupan pelayanan persampahan kota	%	100	77	49,41	49,41	Belum mencapai target
	Meningkatnya Respon dan Layanan kebakaran kabupaten	Cakupan layanan kebakaran skala kabupaten	%	100,00	100			Belum rilis
5	Menurunnya Gangguan ketentraman dan Ketertiban	Angka kriminalitas	%	8-5	436			Belum rilis

Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Persentase Desa Tangguh Bencana

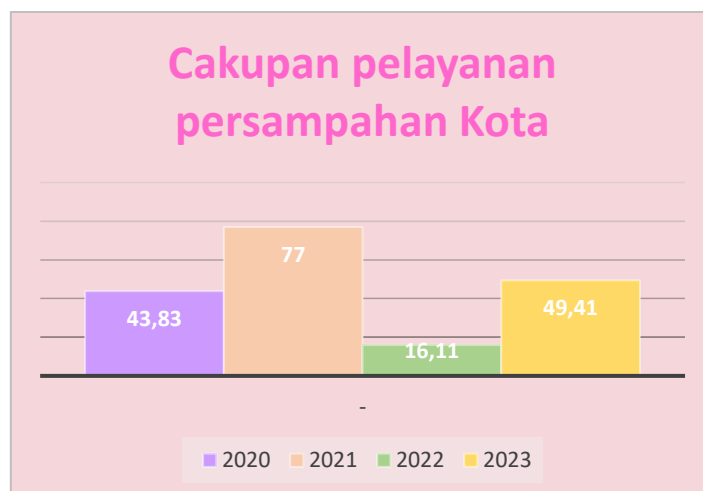


Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2023

Dari grafik di atas dapat terlihat di akhir P-RPJMD 2018-2023 persentase desa tangguh bencana tertinggi yaitu di tahun 2023 dengan capaian realisasi 7,94% dari target 19,84-23,80. Indikator persentase desa tangguh bencana belum mencapai target.

Sasaran Strategis Meningkatkan Layanan Kebersihan dan Penataan Lingkungan Kota Bungku”

Cakupan Pelayanan Persampahan Kota



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2023

Dari grafik diatas terlihat perbandingan indikator cakupan Pelayanan Persampahan, di akhir P-RPJMD 2018-2023 persentase cakupan pelayanan persampahan kota meningkat di banding dengan tahun 2022, yaitu 16,11% dan di tahun 2023 meingkat 33,3 poin sehingga capaian realisasi 49,41% namun peningkatan tersebut belum dapat memenuhi dari target yang telah di tentukan dalam P-RPJMD 2018-2023 yaitu 100%.

3.2 Realisasi Anggaran

Berikut di sajikan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Daerag di kelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan transfer.

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1.798.260.416.252,00	1.636.443.675.447,12	91,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	469.865.015.455,00	467.543.895.078,12	99,51
4.1.01	Pajak Daerah	186.107.154.678,00	245.898.202.207,06	132,13
4.1.02	Retribusi Daerah	170.239.000.000,00	172.957.582.787,00	101,60
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.810.921.029,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	111.707.939.748,00	48.688.110.084,06	43,59
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	469.865.015.455,00	467.543.895.078,12	99,51
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.328.395.400.797,00	1.168.899.780.369,00	87,99
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.265.247.626.000,00	1.100.009.514.707,00	86,94
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.147.774.797,00	68.890.265.662,00	109,09
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.328.395.400.797,00	1.168.899.780.369,00	87,99

	JUMLAH PENDAPATAN	1.798.260.416.252,000	1.636.443.675.447,120	91,00
5	BELANJA DAERAH	2.150.817.432.038,00	1.677.686.655.458,00	78,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.355.055.336.663,00	1.088.538.180.498,00	80,33
5.1.01	Belanja Pegawai	459.259.650.744,00	382.780.440.041,00	83,35
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.336.037.129,00	575.590.499.167,00	76,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.664.000.000,00	1.222.452.521,00	73,46
5.1.05	Belanja Hibah	103.551.648.790,00	95.836.580.769,00	92,55
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.244.000.000,00	33.108.208.000,00	99,59
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.355.055.336.663,00	1.088.538.180.498,00	80,33
5.2	BELANJA MODAL	564.149.367.353,00	361.422.542.130,00	64,07
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.259.232.798,00	3.955.772.000,00	42,72
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.473.954.049,00	63.142.176.575,00	85,94
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.069.430.852,00	125.883.312.660,00	79,14
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	320.155.872.463,00	168.158.009.115,00	52,52
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.190.877.191,00	283.271.780,00	12,93

	JUMLAH BELANJA MODAL	564.149.367.353,00	361.422.542.130,00	64,07
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.018.657.154,00	912.948.000,00	89,62
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.018.657.154,00	912.948.000,00	89,62
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1.018.657.154,00	912.948.000,00	89,62
5.4	BELANJA TRANSFER	230.594.070.868,00	226.812.984.830,00	98,36
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	29.831.821.018,00	23.719.161.036,00	79,51
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	200.762.249.850,00	203.093.823.794,00	101,16
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	230.594.070.868,00	226.812.984.830,00	98,36
	JUMLAH BELANJA	2.150.817.432.038,00	1.677.686.655.458,00	78,00
	SURPLUS/DEFISIT	(352.557.015.786,00)	(41.242.980.010,88)	11,70
6	PEMBIAYAAN DAERAH	352.557.015.786,00	352.848.667.602,38	100,08
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	355.619.634.336,00	355.619.634.336,38	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	355.619.634.336,00	355.619.634.336,38	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	355.619.634.336,00	355.619.634.336,38	100,00

6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.062.618.550,00	2.770.966.734,00	90,48
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.562.618.550,00	1.270.966.734,00	81,34
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.062.618.550,00	2.770.966.734,00	90,48
	PEMBIAYAAN NETTO	352.557.015.786,00	352.848.667.602,38	100,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	311.605.687.591,50	0,00

3.3 Efisiensi Anggaran

Berikut data efisiensi anggaran di sajikan :

NO	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
1	2	4	5
T1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	66,24%	93,37%
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Belum rilis	92%
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Belum rilis	97,63%
	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	109,4%	94,33%
T2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	135,60%	96,89%
	Tumbuhnya Investasi Daerah	-0,02%	93,09%
	Meningkatnya PDRB perkapita	Belum rilis	99,65%
	Rendahnya Ketimpangan Pendapatan antar Masyarakat	106,33	98,16%
	Menurunya Jumlah Pengangguran	142%	79,23%
	Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	48%	93,58%
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	99,19%	90,34%
	Menurunnya Penduduk Miskin	100,70%	76,42%
	Persentase PMKS Kebutuhan Dasarnya	111,63	98,14%
T3	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam Meciptakan Generasi Muda yang Imtaq	29,22%	96,94%
	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	0,26%	88,48%
	Meningkatnya Partisipasi Oraganisasi Kepemudaan dan Prestasi Olahraga Daerah	3,38%	98,08%
	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah	Belum rilis	93,10%
	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	Belum rilis	90,92%

	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Beragama Kabupaten Morowali	Belum rilis	99,86%
T4	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar daerah	43,66%	97,43%
	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	55,68%	95,17
T5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20%	96,48%
	Meningkatnya Layanan Kebersihan dan Penataan Lingkungan Kota Bungku	49,41%	96,75%
	Meningkatnya Respon dan Layanan kebakaran kabupaten	Belum rilis	97,60%
	Menurunnya Gangguan ketentraman dan Ketertiban	Belum rilis	91,34%

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat: Kompleks KTM. Morowali - BUNGKU


PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Morowali.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bungku, 25 Maret 2024

INSPEKTUR,

AFRIDIN, SH. M.S.A.
Pembina Utama Muda
NIP.19670308 199203 1 010



BUPATI MOROWALI
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. RACHMANSYAH ISMAIL

Jabatan : Pj. Bupati Morowali

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bungku, November 2023

Pj. Bupati Morowali,



A. RACHMANSYAH ISMAIL



BUPATI MOROWALI
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. RACHMANSYAH ISMAIL

Jabatan : Pj. Bupati Morowali

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bungku, November 2023

Pj. Bupati Morowali,



A. RACHMANSYAH ISMAIL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	BB
2	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat	B
3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	WTP
4	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	0,7647
		Persentase status desa maju	12-13
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	10-15
6	Tumbuhnya investasi daerah	Pertumbuhan pembentukan modal tetap Bruto (PMTB)	4-6
7	Meningkanya PDRB perkapita	PDRB perkapita	300-400
8	Rendahnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat	Gini Rasio	0,30-0,24
9	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka TPT)	2-3
10	Meningkatkan kesejahteraan petani dan Nelayan	Nilai tukar petani (NTP)	100-102
		Nilai tukar nelayan (NTN)	106
11	Meningkatkan ketersediaan pangan	Skor pola pangan harapan (SPPH)	86.00-88.00
12	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	12,40-9,8

13	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	75-80
14	Meningkanya standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang lmtaq	Indeks Pendidikan	50,00-55,00
		Harapan Lama Sekolah	14,30-14,50
		Rata-rata lama sekolah	10-10,30
15	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan	Indeks kesehatan	69,50-70
		Usia harapan hidup	69,50-70
		Angka stunting	6,60-6,10
16	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan perstasi olahraga daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	100
		Peningkatan partisipasi olahraga	37
17	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks pembangunan gender (IPG)	85-90
18	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya lokal	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	75-80
		persentase kesenian lokal yang dilestarikan	75-80
19	Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama Kab. Morowali	Indeks kerukunan beragama	70-80
20	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Daerah	Promosi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	25,550-30,00
		Rasio elektrifikasi	99,00-99,20

		Perentase Rumah Layak Huni	80-85
		Persentase RT Berakses Air Bersih	90-92
21	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	90-95
		Persentase koneksi internet Desa	80-90
22	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indesk rawan bencana	90-85
		Persentase desa tangguh bencana	19,84-23,80
23	Meningkatnya layanan penataan lingkungan Kota Bungku	Cakupan pelayanan persampahan Kota	100
24	Meningkanya respon dan layanan kebakaran kabupaten	Cakupan Layanan Kebakaran Skala Kabupaten	100
25	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	8-5

No.	Program Sasaran	Anggaran
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Rp. 1.131.775.626.042,00
No	Urusan Pemerintahan Pendidikan	Rp. 336.792.366.297,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 166.165.185.010,00
2	Program Pengelola Pendidikan	Rp. 166.161.928.512,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 526.043.140,00
4	Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	Rp. 3.939.209.635,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Rp. 303.375.458.597,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 241.637.369.809,00
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 57.936.117.778,00
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.693.905.430,00
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 457.130.580,00
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.650.935.000,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 337.263.817.049,00
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 13.447.170.343,00
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 26.400.571.803,00
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 7.176.171.871,00
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 300.000.000,00
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 10.816.035.046,00
15	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 34.468.824.118,00
16	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 286.576.500,00
17	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 243.553.061.178,00
18	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 141.506.764,00
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 673.899.426,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	90.854.812.083,00
20	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 6.085.608.913,00
21	Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.336.400.000,00
22	Program Kawasan Permukiman	Rp 22.941.805.710,00
23	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 60.490.997.460,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	41.266.677.565,00
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 24.982.903.504,00
25	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp 1.793.195.000,00
26	Program Penanggulangan Bencana	Rp 14.399.939.061,00
27	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Non Penyelamatan	Rp 90.640.000,00

No.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Rp	22.222.494.451,00
28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	4.867.327.121,00
29	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	1.561.877.830,00
30	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	8.681.041.400,00
31	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp	6.706.459.200,00
32	Program Penanganan Bencana	Rp	358.410.250,00
33	Program Pengelola Taman Makam Pahlawan	Rp	47.378.650,00
2	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Rp	149.413.544.049,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Rp	14.676.649.355,00
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	13.191.133.335,00
35	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp	893.650.500,00
36	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	319.406.520,00
37	Program Hubungan Industrial	Rp	272.459.000,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Rp	895.010.000,00
38	Program Pengurusan Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	67.450.000,00
39	Program Perlindungan Perempuan	Rp	76.725.000,00
40	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	34.740.000,00
41	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	229.270.000,00
42	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	486.825.000,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Rp	1.767.593.607,00
43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.625.823.207,00
44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	96.925.000,00
45	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	44.845.400,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Rp	11.636.269.548,00
46	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan tanah Untuk Pembangunan	Rp	11.636.269.548,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Rp	19.050.182.904,00
47	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	5.986.570.784,00
48	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	408.312.000,00
49	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	319.404.500,00
50	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	229.031.350,00
51	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp	42.670.000,00
52	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	28.400.000,00
53	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	96.312.000,00
54	Program Pengelolaan Sampah	Rp	11.939.482.270,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rp	5.352.903.967,00
55	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	4.665.738.611,00
56	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	348.664.356,00
57	Program Pencatatan Sipil	Rp	148.045.000,00

58	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	61.676.000,00
59	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	128.780.000,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		9.904.455.259,00
60	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	6.236.285.764,00
61	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	99.539.000,00
62	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp	2.022.484.320,00
63	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.546.146.175,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian dan Keluarga Berencana	Rp	4.342.508.691,00
64	Program Pengendalian Penduduk	Rp	1.964.790.481,00
65	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	99.990.650,00
66	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	2.277.727.560,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Rp	15.230.686.273,00
67	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	7.889.041.347,00
68	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	4.652.136.340,00
69	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	2.689.508.586,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Rp	9.973.566.234,00
70	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	4.397.061.987,00
71	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp	2.094.441.262,00
72	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	3.482.062.985,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Rp	18.971.290.240,00
73	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	5.734.541.314,00
74	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	76.525.000,00
75	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	29.919.500,00
76	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Rp	500.775.400,00
77	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp	5.253.441.000,00
78	Program Pemberdayaan Usaha, Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	1.366.013.190,00
79	Program Pengembangan UMKM	Rp	6.010.074.836,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Rp	8.767.203.694,00
80	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	7.324.687.244,00
81	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	100.528.950,00
82	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	506.249.500,00
83	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	304.158.000,00
84	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	531.580.000,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Rp	15.998.691.418,00
85	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	6.683.321.688,00
86	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	650.852.000,00
87	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	8.108.331.830,00

88	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	556.185.900,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Rp	6.937.033.314,00
89	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	6.043.630.674,00
90	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	893.402.640,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Rp	5.526.660.785,00
91	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	4.737.632.155,00
92	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	762.991.150,00
93	Program Pelestasian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp	26.037.480,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Arsip	Rp	382.838.760,00
94	Program Pengelolaan Arsip	Rp	292.946.700,00
95	Program Perlindungan Dan Peleyamatan Arsip	Rp	89.892.060,00
3	Urusan Pemerintah Pilihan	Rp	208.564.382.510,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Rp	63.347.235.136,00
96	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	8.274.212.146,00
97	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	46.217.544.080,00
98	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	4.855.178.310,00
99	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp	247.156.000,00
100	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	3.753.144.600,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Rp	4.308.780.948,00
101	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	Rp	1.052.264.220,00
102	Program Program Pemasaran Pariwisata	Rp	571.408.180,00
103	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp	2.685.108.548,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Rp	127.907.722.739,00
104	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	21.816.026.986,00
105	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	78.895.360.243,00
106	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	18.155.559.560,00
107	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1.045.662.050,00
108	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	573.674.960,00
109	Program Penyuluh Pertanian	Rp	7.421.438.940,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Rp	8.945.790.584,00
110	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	4.709.888.561,00
111	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	29.230.500,00
112	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	3.053.714.435,00
113	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp	816.330.400,00
114	Program Standarasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp	274.125.788,00
115	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	62.500.900,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Rp	3.634.093.123,00
116	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp	3.547.026.123,00
117	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	44.907.000,00

118	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	42.160.000,00
No.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Rp	420.759.980,00
119	Program Perencanaan Kawasan Transigrasi	Rp	34.831.000,00
120	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	33.087.000,00
121	Program Pengembangan Kasawan Transmigrasi	Rp	352.841.980,00
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Rp	198.371.295.241,00
No.	Sekretariat Daerah	Rp	157.523.590.606,00
122	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	52.692.981.966,00
123	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	101.969.473.290,00
124	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp	2.861.135.350,00
No.	Sekretariat DPRD	Rp	40.847.704.635,00
125	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	29.608.496.135,00
126	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp	11.239.208.500,00
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp	347.603.960.706,00
No.	Perencanaan	Rp	13.755.537.750,00
127	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	9.132.724.450,00
128	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	2.811.260.950,00
129	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penbangan Daerah	Rp	1.811.552.350,00
No.	Keuangan	Rp	322.109.078.242,00
130	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	75.803.263.691,00
131	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	237.602.916.712,00
132	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	4.275.726.840,00
133	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.427.170.999,00
No.	Kepegawaian	Rp	8.125.559.349,00
134	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	5.218.444.349,00
135	Program Kepegawaian Daerah	Rp	2.907.115.000,00
No.	Pendidikan Dan Pelatihan	Rp	2.334.056.775,00
136	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	2.334.056.775,00
No.	Pelatihan Dan Pengembangan	Rp	1.279.728.590,00
137	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp	1.279.728.590,00
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Rp	20.201.398.720,00
No	Inspektorat Daerah	Rp	20.201.398.720,00
138	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	16.405.531.220,00
139	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	2.111.372.000,00
140	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp	1.684.495.500,00
7	Urusan Kewilayahan	Rp	62.363.701.743,00
No	Kecamatan	Rp	62.363.701.743,00
141	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp	47.980.096.525,00
142	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	1.499.260.955,00
143	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	10.579.450.633,00

144	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	67.014.250,00
145	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	1.472.772.040,00
146	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	668.107.340,00
8	Unsur Pemerintahan Umum	Rp	32.523.523.027,00
No	Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	32.523.523.027,00
147	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.991.811.007,00
148	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	1.990.062.350,00
149	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	24.959.828.020,00
150	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	273.817.300,00
151	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	686.765.350,00
152	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	621.239.000,00
Total		Rp	2.150.817.432.038,00

Bungku, November 2023

Pj. Bupati Morowali,



A. RACHMANSYAH ISMAIL



BUPATI MOROWALI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.,M.P

Jabatan : Pj. Bupati Morowali

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bungku, Maret 2024

Pj. Bupati Morowali,



Ir. H. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.,M.P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,03
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,54
		Indeks Gini Kabupaten	0,284
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	400,10
		Inflasi	3,00
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,2
	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	1,00
		Nilai Investasi	65 Triliun
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,40
		Stunting (SSGI)	20
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	55,00	
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Publik	75,00
		Nilai Sakip	B
		Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	73,7
		Indeks Inovasi Daerah	32,50
		Nilai SPBE	1,53
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	68,96
	Meningkatkan Kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN	71

4	Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	23,50
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	50,00
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,54
5	Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang Aman dan Tenram Damai dan Harmonis	Angka Kriminalitas	19,00
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,00
6	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah dan Kemajuan Pembangunan Desa	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	174
		Indeks Desa Membangun	0,6528

No.	Program Sasaran	Anggaran
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp. 1.236.976.641.363,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rp. 449.626.604.362,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 247.112.832.230,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 195.140.452.842,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 751.392.890,00
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 6.621.926.400,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp. 379.742.479.387,00
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 265.878.677.999,00
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 112.123.558.538,00

7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp.	1.321.137.500,00
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp.	314.130.850,00
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp.	104.974.500,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp.	248.389.125.067,00
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	16.134.439.762,00
11	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp.	41.370.219.969,00
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp.	4.531.554.957,00
13	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp.	248.750.250,00
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp.	8.556.355.190,00
15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp.	3.619.550.000,00
16	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp.	58.485.475.136,00
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp.	110.955.266.333,00
18	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp.	414.456.570,00
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp.	4.073.056.900,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp.	102.316.358.646,00
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	7.009.907.579,00
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp.	1.076.536.000,00
22	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp.	34.311.231.066,00
23	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp.	59.918.684.001,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp.	35.163.577.205,00
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	27.224.632.549,00
25	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	645.655.960,00
26	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp.	7.211.116.393,00

27	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp.	82.172.303,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Rp.	21.738.496.696,00
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.237.593.119,00
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp.	348.833.754,00
30	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp.	6.703.717.040,00
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp.	8.032.000.235,00
32	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp.	352.012.298,00
33	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp.	64.340.250,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp.	299.817.835.709,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Rp.	10.011.909.993,00
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.668.095.499,00
35	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp.	149.827.000,00
36	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp.	1.862.527.486,00
37	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp.	758.049.908,00
38	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp.	573.410.100,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp.	1.212.209.945,00
39	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp.	166.580.000,00
40	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp.	332.537.300,00
41	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp.	76.660.000,00
42	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp.	349.908.245,00
43	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp.	286.524.400,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rp.	210.791.900,00
44	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp.	157.374.450,00
45	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp.	26.929.850,00
46	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp.	26.487.600,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Rp.	100.814.066.500,00

47	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp.	34.901.500,00
48	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp.	100.689.225.000,00
49	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Rp.	29.982.500,00
50	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp.	59.957.500,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	37.981.180.754,00
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.821.955.223,00
52	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	661.332.000,00
53	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	394.000.140,00
54	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp.	767.898.604,00
55	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp.	283.475.830,00
56	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp.	60.980.000,00
57	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp.	55.292.000,00
58	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp.	94.502.000,00
59	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	160.063.000,00
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp.	28.681.681.957,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp.	7.830.474.004,00
61	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	7.113.368.004,00
62	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp.	181.468.000,00
63	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp.	262.518.000,00
64	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp.	273.120.000,00

No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp.	11.605.281.925,00
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	7.559.692.063,00
66	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp.	142.974.000,00
67	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp.	1.374.061.000,00
68	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp.	2.528.554.862,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp.	5.417.884.749,00
69	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp.	329.025.266,00
70	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp.	3.732.723.911,00
71	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp.	1.356.135.572,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rp.	19.864.373.614,00
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	7.052.262.666,00
73	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp.	5.400.699.935,00
74	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp.	7.411.411.013,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp.	12.792.333.667,00
75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.488.938.122,00
76	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp.	2.085.797.395,00
77	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp.	4.217.598.150,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp.	22.002.160.182,00
78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	14.116.262.551,00
79	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp.	109.938.500,00
80	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp.	119.979.500,00
81	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp.	177.997.790,00

82	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp.	149.938.000,00
83	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp.	7.328.043.841,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Rp.	11.470.859.587,00
84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	9.714.097.437,00
85	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp.	327.000.000,00
86	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp.	506.338.650,00
87	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp.	358.733.500,00
88	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp.	479.384.000,00
89	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp.	85.306.000,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Rp.	42.674.167.394,00
90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	8.324.984.070,00
91	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp.	1.819.783.465,00
92	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp.	32.294.056.233,00
93	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp.	235.343.626,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Rp.	755.547.700,00
94	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp.	755.547.700,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Rp.	521.533.270,00
95	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp.	521.533.270,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Rp.	7.399.159.700,00
96	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp.	4.125.595.500,00
97	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp.	1.360.969.200,00
98	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp.	1.912.595.000,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Rp.	6.733.713.325,00

99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	5.669.056.390,00
100	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp.	1.021.846.135,00
101	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rp.	42.810.800,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Rp.	520.187.500,00
102	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp.	481.089.220,00
103	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp.	39.098.280,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp.	187.606.412.991,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp.	48.225.772.293,00
104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	8.887.296.456,00
105	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp.	33.422.667.775,00
106	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp.	2.510.124.313,00
107	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp.	581.279.700,00
108	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp.	2.824.404.049,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Rp.	11.455.805.719,00
109	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp.	6.403.542.625,00
110	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp.	448.259.400,00
111	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp.	4.604.003.694,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Rp.	112.891.623.483,00
112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	19.761.339.587,00
113	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp.	69.480.491.298,00
114	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp.	16.813.606.500,00
115	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp.	260.906.700,00
116	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp.	6.575.279.398,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rp.	3.522.421.220,00

117	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	32.890.000,00
118	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp.	89.954.500,00
119	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp.	1.979.845.220,00
120	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp.	1.111.222.000,00
121	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp.	223.939.000,00
122	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp.	84.570.500,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp.	10.843.406.501,00
123	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	5.236.470.612,00
124	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp.	5.405.608.639,00
118	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp.	66.936.000,00
125	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		134.391.250,00
No.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Rp.	667.383.775,00
126	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp.	667.383.775,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp.	173.906.421.365,00
No.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp.	131.966.386.347,00
127	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	89.873.475.657,00
128	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	38.495.622.340,00
129	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp.	3.597.288.350,00
No.	SEKRETARIAT DPRD	Rp.	41.940.035.018,00
130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	31.735.559.268,00
131	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp.	10.204.475.750,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp.	453.992.230.484,00
No.	PERENCANAAN	Rp.	18.031.503.122,00

132	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	12.233.916.622,00
133	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	3.336.090.350,00
134	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	2.461.496.150,00
No.	KEUANGAN	Rp.	420.436.156.496,00
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	108.065.054.521,00
136	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp.	306.553.650.623,00
137	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp.	1.489.110.750,00
138	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp.	4.328.340.602,00
No.	KEPEGAWAIAN	Rp.	9.642.661.146,00
139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	5.710.716.146,00
140	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp.	3.931.945.000,00
No.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp.	4.357.483.000,00
141	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp.	4.357.483.000,00
No.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp.	1.524.426.720,00
142	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	1.524.426.720,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Rp.	21.629.412.885,00
No.	INSPEKTORAT DAERAH	Rp.	21.629.412.885,00
143	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	17.302.741.885,00
144	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp.	2.639.640.000,00
145	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp.	1.687.031.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	Rp.	76.891.178.187,00
No.	KECAMATAN	Rp.	76.891.178.187,00
146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	62.494.356.211,00
147	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	3.344.685.307,00
148	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	7.674.808.578,00

149	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	158.464.500,00
150	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.	2.650.910.591,00
151	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	567.953.000,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Rp.	61.541.199.743,00
No.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp.	61.541.199.743,00
152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.528.272.097,00
153	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp.	1.523.232.750,00
154	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp.	36.819.614.036,00
155	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp.	321.986.900,00
156	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp.	727.851.960,00
157	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp.	17.620.242.000,00
JUMLAH		Rp.	2.512.361.332.727,00

Bungku, Maret 2024

Pj. Bupati Morowali,



I. H. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.,M.P